

KURAWAL
... FOUNDATION ...

PANDEMIC VERSARY

The **GOOD** The **BAD** And The **UGLY**

Para Tokoh di Tengah
Pusaran Wabah

Pandemic-versary: The Good, The Bad, and The Ugly

Penulis :
Tim Yayasan Kurawal

ISBN :
978-623-96938-1-7(PDF)

Penyunting :
Darmawan Triwibowo

Periset :
Haris Prabowo

Desainer Sampul, Ilustrasi, dan Tata Letak :
Muhammad Nauval Firdaus

Penerbit :
Yayasan Kurawal

Alamat Redaksi :
WeWork #108 – Gama Tower
Jalan HR. Rasuna Said C-22, Karet, Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Cetakan pertama, Mei 2021

Buku ini Terbuka untuk Diakses dan
Diperbanyak oleh Publik Selama Tidak Diperjualbelikan
untuk Kepentingan Komersil

{ KURAWAL }
FOUNDATION

PANDEMIC VERSARY

The GOOD The BAD And The UGLY

Haris Prabowo, Muhammad Nauval Firdaus

Penyunting :
Darmawan Triwibowo

PANDEMIC-VERSARY: UPAYA MERAWAT INGAT

*The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget;
the wise forgive but do not forget*

Di masa pandemi, banyak hal yang tidak mungkin dan tidak seharusnya dilupakan. Barisan korban yang tumbuh seperti deret ukur - 1.379.662 kasus positif pada 7 Maret 2021 - sementara tingkat testing masih setia merangkak seperti deret hitung adalah salah satu contoh. Demikian pula tipu muslihat pejabat publik yang menggelapkan informasi, mengesahkan undang-undang yang culas dan meminggirkan sains, atau politisi yang berkeras mendorong pilkada di tengah wabah sementara sejawatnya sibuk mengkorupsi bantuan sosial warga. Banyak ihwal yang tidak layak untuk kita lupakan, semisal cucuran peluh dan air mata para tenaga medis yang harus merelakan kepergian 842 rekan-rekan kerjanya akibat ketidakbecusan negara.

Terdapat laksana peristiwa yang berjerait selama satu tahun kita bertentang muka dengan hawar COVID-19 dan selayaknya kita rawat sebagai pengingat. Dalam konteks tersebut, "Pandemic-versary" adalah upaya kecil untuk menolak lupa. Sebentuk "batu pengingat digital" (digital memorial stone) atas peran aktor-aktor yang terlibat dalam periode kritis tersebut, baik dengan memberikan kontribusi positif maupun melakukan pengabaian serta tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung memperburuk pandemi yang dialami Indonesia.

Pandemic-versary merupakan sewujud rapor tahunan yang kami sampaikan kepada publik berdasar kumpulan informasi dan data yang telah terverifikasi dan dipublikasikan secara luas. Sebuah ajakan kepada warga untuk terus-menerus menagih pertanggungjawaban negara bagi perbaikan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Forgive your enemies, but never forget their names.

Darmawan Triwibowo

Yayasan Kurawal

Pandemi Tak Pernah Ingkar Janji: Sebuah Pendahuluan

Sudah lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, penanganan pandemi tak banyak memberikan dampak. Alih-alih menangani pandemi semaksimal mungkin dengan memberi hak atas kesehatan untuk publik, para elite hanya menyuguhkan perilaku tak sensitif, abai, hingga koruptif.

Hingga 7 Maret lalu, tercatat lebih dari 1,3 juta orang Indonesia terinfeksi pagebluk corona—yang juga menyebar ke seluruh dunia. Setidaknya, sudah 37.266 nyawa melayang selama satu tahun penanganan wabah oleh rezim yang sejak awal sangat terlihat tak sigap, bahkan cenderung meremehkan. Dalam menangani pandemi, Indonesia bak “negara auto-pilot”.

Ragam kebijakan memang sudah diambil untuk tangani wabah. Namun, di banyak kasus, tak sedikit kebijakan muncul yang kurang akurat, telat, bahkan kerap kontradiktif dengan sikap Pemerintah.

Salah satunya mengenai ketidaktersediaan kasur rumah sakit untuk pasien COVID-19 di Indonesia. Untuk rasio per 1.000 penduduk, Indonesia hanya punya 1,04 kasur rumah sakit. Sedangkan di Amerika Serikat bisa 2,77 kasur dan di Korea Selatan mencapai 12,77 kasur.

Pada akhir 5 April 2020, Pemerintah menunjuk 132 rumah sakit rujukan COVID-19. Totalnya terdapat 42.207 kasur. Namun, di dalam satu rumah sakit, tak hanya ada pasien COVID-19, melainkan pasien dari ragam penyakit lain. Tentu jumlah ketersediaan tidak akan cukup, apalagi mengingat Pemerintah kerap tidak transparan terhadap data yang diumumkan setiap hari—kasus riil lebih banyak daripada yang diumumkan. Ini menunjukkan bagaimana infrastruktur kesehatan di Indonesia masih sangat rentan ketika menghadapi pandemi.

Pemerintah memang berupaya membangun sebuah rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau—langkah yang coba meniru Pemerintah China membangun rumah sakit khusus di Wuhan. Namun, masalahnya, lokasi rumah sakit tersebut jauh dari episentrum

wabah yaitu DKI Jakarta: 830 kilometer. Sangat berbeda dengan rumah sakit COVID-19 Wuhan yang hanya berjarak 10 kilometer, atau rumah sakit COVID-19 Moskow, Rusia, yang hanya berjarak 70 kilometer, dari pusat kota masing-masing.

Rumah sakit COVID-19 Pulau Galang yang menelan biaya hampir Rp400 miliar itu pun hanya bisa menampung 360 pasien.

Belum lagi ikhtiar Pemerintah yang ingin memasifkan pemeriksaan COVID-19. 11 Maret 2020, Pemerintah mengklaim bisa melakukan pemeriksaan sebanyak 1.700 spesimen per hari. Namun faktanya, sepanjang Maret, rerata sampel yang diuji hanya 225 spesimen per hari.

13 April 2020, Presiden Joko Widodo menargetkan untuk bisa memeriksa sebanyak 10.000 spesimen per hari. Namun, nyatanya angka itu baru tercapai di pekan awal Juni. Saat itu juga, tepatnya 4 Juni 2020, Presiden menaikkan lagi target per harinya menjadi 20.000 spesimen. Angka tersebut baru tercapai satu bulan setelah pada pekan awal Juli.

13 Juli 2020, Jokowi kembali targetkan pemeriksaan menjadi 30.000 spesimen per hari, namun apa daya, angka itu baru tercapai dua bulan setelahnya pada pekan awal September.

Angka spesimen per hari tentu saja berbeda dengan jumlah orang yang dites. Satu orang, misalnya, bisa dites menggunakan satu atau dua spesimen, atau bahkan lebih. Faktanya, sepanjang April hingga September 2020, jumlah orang yang dites tak bisa stabil di atas 15.000 jiwa. Padahal, World Health Organization (WHO) menganjurkan agar 38.000 orang dites per hari—orang, bukan spesimen.

Mari bergeser ke positivity rate. Sepanjang Mei hingga September 2020, rerata angka positivity rate per hari mencapai 13,8 persen. Itu artinya, ada 138 orang yang positif COVID-19 dari 1.000 orang yang dites. Sejak awal September, angka tersebut naik menjadi 19 persen, yang artinya ada 190 orang yang positif dari 1.000 orang yang dites.

Padahal, WHO memiliki batas hanya 50 orang yang positif COVID-19 dari 1.000 orang yang dites.

Kasus lainnya yang menjadi bobrok Pemerintah adalah ketertutupan data kematian akibat COVID-19. Pada 23 Desember 2020, juru bicara Satgas COVID-19 mengumumkan total angka kematian di Indonesia mencapai 20.408 orang. Namun, angka dari internal Kementerian Kesehatan mencapai 26.297 orang. Itu artinya, ada total 5.889 kematian yang dilaporkan dari daerah ke pusat menguap begitu saja.

Dalam data internal Kementerian Kesehatan juga ditemukan kategori “kematian probable”—WHO menganjurkan untuk masuk ke status positif COVID-19, yang pada 23 Desember 2020, angkanya menyentuh 7.490 orang. Itu artinya, harusnya angka kematian yang diumumkan Pemerintah mencapai 33.787 orang.

Buruknya lagi, angka internal Kementerian Kesehatan tersebut baru bekerja sejak 1 September 2020, bukan sejak 2 Maret saat pertama kali diumumkan. Itu artinya, angka 33 ribuan tersebut hanya terbatas pada 1 September hingga 23 Desember 2020.

Belum selesai mengenai masalah-masalah di atas, Presiden Jokowi bermimpi untuk cepat kilat melakukan vaksinasi. Ia awalnya menargetkan vaksinasi di Indonesia selesai dalam 15 bulan, yang dikemudian hari diminta dipercepat lagi menjadi 12 bulan. Untuk mencapai kekebalan kelompok, setidaknya ada 181 juta warga Indonesia yang harus disuntik vaksin.

Ragam hitungan ilmiah membikin target Jokowi tersebut akan meleset. Semisal pada 6 Februari lalu, total dosis yang digunakan hari itu mencapai 64.187. Jika angka tersebut konsisten, vaksinasi Indonesia baru akan selesai di atas 10 tahun. Hingga 28 Februari pun angka dosis harian masih 111.856. Target 12 bulan yang digaungkan Jokowi itu menjadi utopis, mengingat memenuhi tersebut setidaknya Indonesia gunakan 900.000 sampai 1 juta dosis vaksin per hari.

Hitungan angka realistis, hingga akhir 2021, dosis vaksin yang akan datang ke Indonesia hanya bertengger di angka 262.208.800 dosis, yang artinya hanya bisa digunakan untuk 111.438.800 orang. Angka tersebut hanya sekitar 60 persen dari target vaksinasi Pemerintah. Tentu saja, target 12 bulan jauh meleset, apalagi ditambah jumlah vaksin yang masih seret.

Ragam angka-angka bermasalah di atas, belum termasuk masalah-masalah lainnya di bidang kebijakan. Semisal program bantuan sosial (bansos) yang malah menjadi ladang korupsi oleh menteri-menterinya sendiri—yang berasal dari partai yang sama dengan presiden. Sang menteri menjadi tersangka kasus korupsi karena mengutip jatah Rp10 ribu per paket bantuan. Untuk wilayah Jabodetabek saja total ada 22,8 juta paket, dengan total kutipan diperkirakan Rp228 miliar.

Belum lagi bansos yang diterima tak sesuai harapan: paket bantuan yang dianggarkan nilainya Rp300 ribu, namun isinya jauh lebih murah—sekitar Rp140 sampai Rp150 ribu. Isinya hanya berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, 10 bungkus mi instan, sarden, dan satu botol saus sambal atau kecap. Kualitasnya pun banyak diragukan. Potensi kerugian bisa mencapai Rp2,73 triliun.

Belum lagi bantuan kuota internet untuk para siswa di Indonesia, yang baru muncul setengah tahun setelah sang menteri meneken aturan agar semua kegiatan belajar berjalan daring, tepatnya 27 Agustus 2020.

Semua hal di atas belum termasuk kebijakan pembatasan sosial yang kerap gonta-ganti nama—mulai dari PSBB hingga PPKM, namun kerap tak tepat sasaran dan tak tegas. Jika pelaku pelanggaran dari unsur pejabat atau politikus, sanksinya lemah. Namun, lain cerita jika pelanggarnya adalah warga kecil ataupun oposisi politik. Belum lagi rezim yang dianggap mencuri momentum mengesahkan dengan cepat kilat ragam regulasi—salah duanya Omnibus Law dan UU Minerba—di tengah pandemi dan penolakan masyarakat sipil.

Maka tak heran, dengan banyaknya masalah dan minimnya upaya yang dilakukan Pemerintah, Indonesia bertengger di posisi 18 dengan kasus positif terbanyak di dunia. Posisi kita jauh di atas berbagai negara Asia Tenggara lainnya: Malaysia di posisi 45, Myanmar di posisi 75, hingga Singapura yang berada di posisi 99.

Riset terbaru dari Lowy Institute, sebuah lembaga think-tank independen asal Australia, menobatkan Indonesia berada di posisi 85 dalam urutan negara dengan kinerja penanganan Covid-19 terbaik. Posisi Indonesia jauh tertinggal oleh Vietnam dan Thailand. Dalam penelitian itu, Lowy Institute menilai Vietnam dan Thailand berhasil menangani pandemi dengan memberi posisi nomor dua dan empat.[]





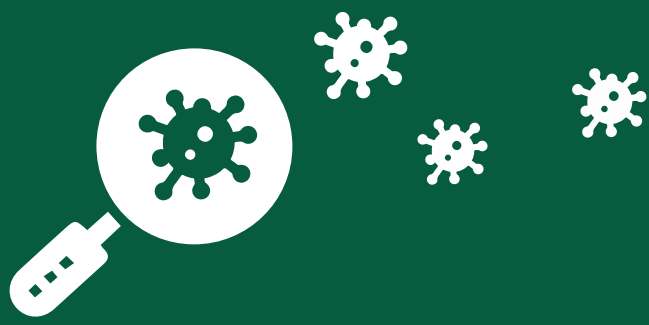
Sita dan Maria adalah dua pasien pertama COVID-19 di Indonesia yang diumumkan oleh Presiden pada 2 Maret 2020. Sita adalah seorang penari, sedangkan ibunya, Maria, adalah seorang dosen tari di Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

“Kami Disebut Perempuan Setan”

- 👤 **Pasien Pertama dan Kedua COVID-19 di Indonesia**
- ❓ **Representasi dari total 1.341.314 pasien COVID-19 di Indonesia hingga 1 Maret 2021.**

Sita dan Maria menghentikan penyangkalan dan kebohongan negara tentang tidak adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Keberadaan pasien pertama dan kedua ini bukan ditemukan oleh sistem deteksi dini Pemerintah, namun karena inisiatif mandiri memeriksa kesehatan dan ngotot meminta untuk dites saat keadaan kesehatan tidak membaik. Tanpa dua pasien pertama tersebut, negara akan terus berbohong entah sampai kapan.

Namun, alih-alih mendapat perlindungan dan rekognisi, mereka berdua malah harus berjuang melawan stigma dan perlakuan yang tidak patut dari negara. Sita dan Maria tahu bahwa mereka terinfeksi dari pengumuman Jokowi di televisi saat konferensi pers, bukan dari dokter yang menanganinya. Padahal, seharusnya pasien diberitahu terlebih dahulu. Secara tidak langsung, mereka menunjukkan bahwa Pemerintah lemah merespons COVID-19.



Sita dan Maria Temukan Corona

14 Februari

Sita Tyasutami bertemu dengan seorang WNA asal Jepang.

16 Februari

Sita merasakan demam tinggi, mual, hingga batuk kering. Inisiatif periksa diri ke RS Mitra Keluarga Depok, namun tak didiagnosis COVID-19.

23 Februari

Maria Darmaningsih ikut sakit.

26 Februari

Sita dan Maria ke rumah sakit dan dirawat inap.

28 Februari

Sita dapat kabar WNA yang dirinya temui positif COVID-19. Sita dan Maria langsung lapor ke RS Mitra Keluarga dan minta dites. Keduanya dirujuk ke RSPI Sulianto Saroso.



Negara Bantah Corona

27 Januari

Terawan minta warga Indonesia jangan panik karena corona. Enjoy saja dan makan yang cukup.

11 Februari

Sejumlah akademisi Universitas Harvard sebut Indonesia mungkin memiliki "kasus yang tak terdeteksi". Terawan membantah.

15 Februari

Mahfud MD dan Airlangga Hartarto berkelakar bahwa COVID-19 tak akan masuk Indonesia izin yang berbelit.

17 Februari

Budi Karya Sumadi sebut warga Indonesia kebal corona karena doyan makan nasi kucing.

18 Februari

Terawan sebut Indonesia berutang kepada Tuhan karena tak ada kasus positif.

1 Maret

Sita dan Maria tes dan positif COVID-19, namun tak diberitahu oleh dokter.

2 Maret

Jokowi umumkan dua kasus pertama positif COVID-19. Ia sebut Sita sebagai pasien 1 dan Maria sebagai pasien 2 tanpa menyebut nama asli.

13 Maret

Sita dan Maria sembuh dan pulang. Mereka diteror dan disebut "perempuan setan" dalam sebuah pesan singkat, karena dianggap membawa virus ke Indonesia.

24 Februari

Doni Monardo sebut warga Indonesia kebal corona karena minum jamu tradisional.

25 Februari

Airlangga sebut Pemerintah keluarkan uang Rp72 miliar untuk influencer promosi wisata di tengah pandemi.

2 Maret

Wali Kota Depok sebar informasi pribadi hingga alamat lengkap Sita dan Maria.

3 Maret

Para warga di perumahan tempat Sita dan Maria tinggal dikucilkan, tak boleh keluar, hingga sulit akses ojek online karena stigma.

16 Maret

Terawan beri jamu kepada tiga pasien pertama yang telah sembuh dari corona.





Pandu dan Tri Yunis adalah salah dua epidemiolog yang rutin mengingatkan Pemerintah terkait salah langkah kebijakan penanganan pandemi. Keduanya adalah pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia.

“Kepada Kami, Luhut Curhat 10 Bulan Belum Berhasil atasi Corona”

Epidemiolog

 **Representasi dari sekitar 400-an ahli epidemiologi di Indonesia yang dipinggirkan pemerintah dalam penanganan pandemi.**

Epidemiolog adalah salah satu wajah paling konkret bagaimana negara meminggirkan sains. Saat Jokowi mengumumkan dua kasus pertama pasien positif COVID-19 pada 2 Maret 2020, epidemiolog Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Februari.

Bertentangan dengan rekomendasi untuk penerapan karantina wilayah dan pendekatan kesehatan publik, Pemerintah malah lebih mementingkan berjalannya roda ekonomi dan stabilisasi politik. Para epidemiolog terus mengkritik kebijakan yang tak berbasis sains: kalung anticorona, obat COVID-19 buatan BIN dan TNI, hingga cara negara kedepankan pariwisata di tengah pandemi. Mereka dipinggirkan dan ditekan oleh negara saat justru mempromosikan pendekatan ilmiah untuk mengambil kebijakan.

Negara yang Menyangkal



27 Januari 2020

Terawan minta warga Indonesia jangan panik karena corona. Enjoy saja dan makan yang cukup.



24 Februari 2020

Doni Monardo sebut warga Indonesia kebal corona karena minum jamu tradisional.



16 Maret 2020

Jokowi belum mengambil langkah apa pun hanyaimbau lakukan segala kegiatan di rumah.



23 Maret 2020

Jokowi tak mau menetapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown.



31 Maret 2020

Jokowi malah mengeluarkan kebijakan PSBB.



Para Ahli Diabaikan Negara

- **24 Januari 2020**

Tri Yunis Miko Wahyono, sebut orang-orang yang mungkin telah terjangkit corona tanpa gejala tidak akan terdeteksi alat pemindai suhu tubuh di Indonesia.

- **11 Februari 2020**

Sejumlah akademisi Universitas Harvard sebut Indonesia mungkin memiliki "kasus yang tak terdeteksi". Terawan membantah.

- **20 Februari 2020**

Tri Yunis Miko Wahyono minta Pemerintah analisis risiko corona dengan hitung jumlah orang yang masuk ke Indonesia dari negara yang sudah terdampak corona.

- **29 Februari 2020**

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menduga ada warga Indonesia yang sudah positif COVID-19 namun tak terdeteksi.

- **19 Maret 2020**

9 organisasi tenaga kesehatan mendesak Pemerintah untuk lockdown Indonesia.

- **29 April 2020**

Pandu Riono sebut Pemerintah tak punya target dan langkah yang jelas atasi wabah.

- **9 Juli 2020**

Pandu Riono kritik Pemerintah yang tak juga evaluasi strategi penanganan COVID-19. Hari itu, terjadi penambahan kasus hingga 2.657 per hari.

- **19 Agustus 2020**

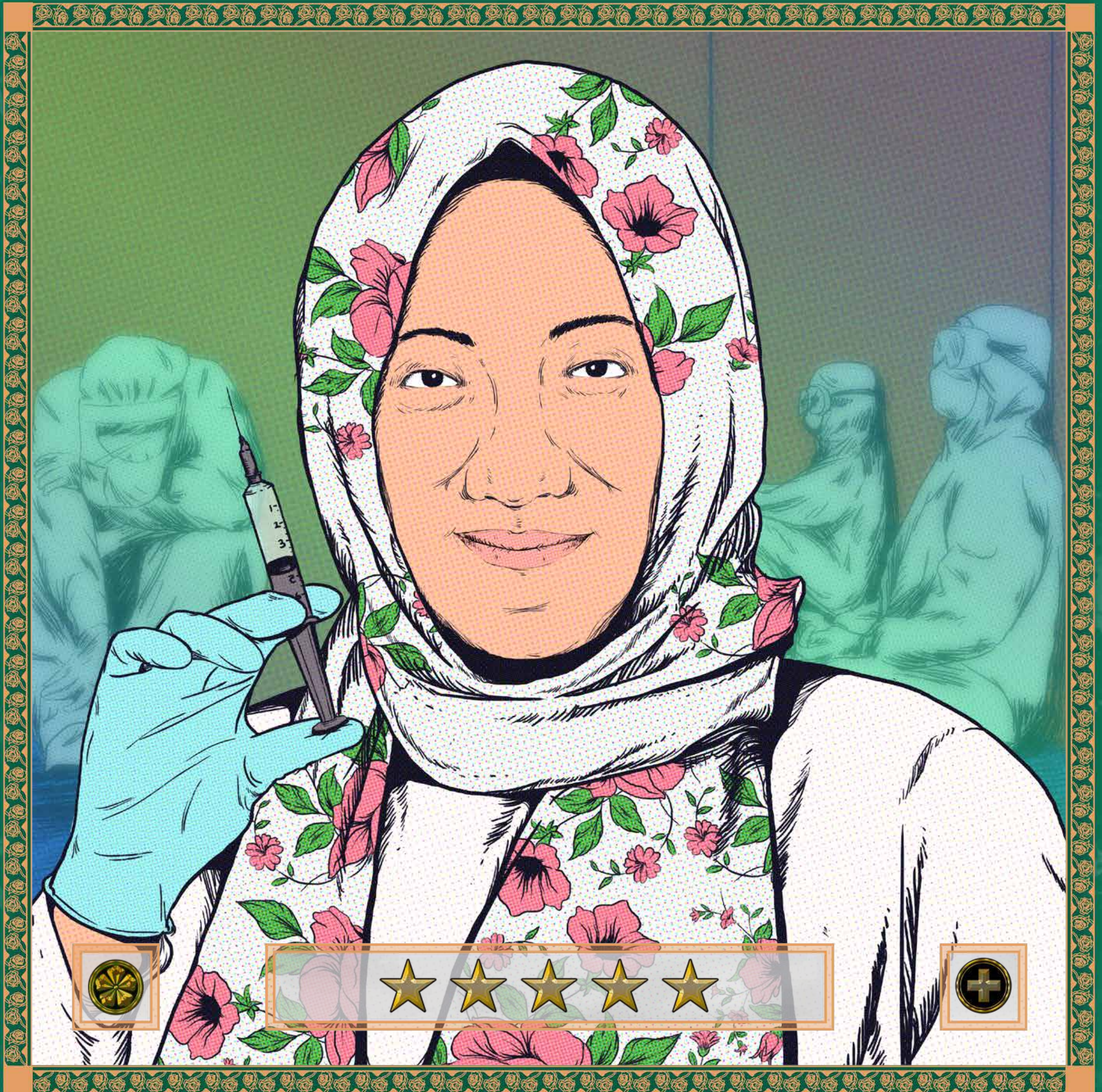
Akun Twitter Pandu Riono diretas, didoxing, dan informasi pribadinya disebar luas lewat WhatsApp.

- **26 September 2020**

Akmal Taher dibentak oleh Luhut karena dianggap melangkahi komando. Luhut tolak penguatan puskesmas yang diusulkan Akmal.

- **29 Februari 2021**

Kepada para ahli, Luhut curhat bahwa selama 10 bulan terakhir Indonesia belum berhasil atasi corona.



Ratih adalah Direktur RS. Duta Indah, Jakarta Utara. Dia juga merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur dan pernah bergiat di Komnas Perempuan.

“Kami Diusir, Dicaci, hingga Dilempar Kotoran Manusia”

- 👤 **Tenaga Kesehatan. Direktur RS. Duta Indah, Jakarta Utara.**
- ❓ **Representasi dari 842 orang tenaga kesehatan yang meninggal selama satu tahun pandemi COVID-19.**

Para tenaga kesehatan adalah profesi yang menjadi garda terdepan dalam perlawanan menghadapi COVID-19. Namun, dengan posisi yang begitu krusial, mereka bekerja dalam kekurangan dan kesulitan: kekurangan alat pelindung diri (APD), nyawa terancam, berhadapan dengan stigma buruk di mata masyarakat, jatuh bangun 24 jam, hingga tunjangan terancam dipotong. Semua terjadi di saat Pemerintah justru ingin mengeksport kelebihan APD. Dengan segala macam perlakuan buruk dan segala kekurangan, mereka tetap melayani sepenuh hati.

Dengan beban kerja yang berat dan distribusi APD yang bermasalah sejak awal, akhirnya para dokter dan tenaga kesehatan bertarung melawan COVID-19 dengan keterbatasan perlindungan. Dokter dan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan meninggal jumlahnya membludak. Pusara Digital Laporan Covid-19 mencatat, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar virus corona mencapai 842 orang. Dari jumlah tersebut, 325 di antaranya dokter, 264 perawat, 138 bidan, 33 dokter gigi, dan sisanya sejumlah tenaga kesehatan lainnya. Sepanjang COVID-19 mewabah sampai saat ini, setidaknya lebih dari 1.700 dokter pernah terpapar. Dari angka tersebut, sebagian tertular dengan tanpa gejala (OTG), ada yang sampai dirawat, dan 325 di antaranya meninggal.

Salah satunya Ratih Purwarini, yang dikenal sebagai salah satu dokter dengan pemahaman perspektif gender yang peka dan baik, sehingga bisa memahami pasien lebih dekat—terutama korban kekerasan oleh pasangan. Ia adalah dokter sekaligus aktivis.



Nasib Muram Tenaga Kesehatan



30 Maret 2020

Dua perawat COVID-19 dari RSPI Sulanti Suroso diusir dari indekos.

27 April 2020

Tiga perawat RSUD Bung Karno, Surakarta, juga diusir dari indekos mereka. Saat itu kasus positif COVID-19 di rumah sakit masih nol.

3 Juni 2020

Petugas medis di Maluku diusir warga saat mau menjemput seorang PDP yang kabur.

1 Mei 2020

Kementerian Kesehatan sebut stigma ke tenaga kesehatan buat tinggi angka kematian akibat COVID-19.

16 Juni 2020

Drone Emprit temukan pola informasi stigma ke para tenaga kesehatan karena krisis kepercayaan. Tenaga kesehatan dituduh ambil keuntungan finansial, bahkan ada yang dicap PKI.

18 Juli 2020

Satgas COVID-19 sebut :

- **135** orang tenaga kesehatan yang mengalami pengusiran dari tempat tinggal.
- **66** orang di antaranya diusir disertai ancaman.
- **160** orang dijauhi orang sekitar,.
- **71** orang merasa dijauhi keluarga.

23 Juli 2020

Petugas medis diusir dan didorong oleh warga ke lubang makam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

7 Agustus 2020

Petugas pelacak kontak dicaci maki dan dikejar anjing penjaga pemilik rumah di Solo.

24 September 2020

Empat petugas kesehatan dilaporkan polisi atas dasar penodaan agama di Pemantang Siantar, Sumatera Utara.

29 September 2020

Tiga orang tenaga medis dilempari kotoran manusia saat ingin menjemput warga di Surabaya.

23 Desember 2020

Setelah 10 bulan, masih ada tenaga medis pelacak kontak diusir di Tuban, Jawa Timur.



Anies adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur DKI Jakarta sejak 2017. Sedangkan Lukas sudah dua periode menjabat sebagai Gubernur Papua sejak 2013.

“Sulitnya Jadi Kepala Daerah di Tengah Wabah”

- 👤 **Gubernur DKI Jakarta dan Papua**
- ❓ **Representasi dari kepala daerah—provinsi dan kabupaten/kota—di zona merah COVID-19 yang kebijakannya sering berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat.**

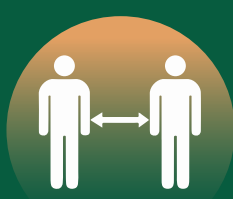
Para kepala daerah adalah salah satu pihak yang memiliki posisi paling sulit di tengah pandemi. Di satu sisi mereka berhadapan langsung dan harus keselamatan warganya, namun di sisi lain harus patuh kepada Pemerintah Pusat yang kerap mendahulukan kebijakan ekonomi dan politik. Mereka seperti dipenjara oleh kebijakan Pemerintah Pusat. Tidak jarang kebijakan mereka berbenturan dengan pusat.

Saat Anies memunculkan wacana lockdown, misalnya, Menteri Tito malah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa penetapan lockdown alias karantina kewilayahan adalah wewenang Presiden. Kritik yang sama juga diterima Lukas saat ingin menutup sementara akses orang dan penumpang dari laut dan udara di Papua.

Namun demikian, mereka tetap berinovasi di tengah segala keterbatasan. Kepala daerah adalah yang paling gesit kerja. Pemerintah Pusat kerap menyerahkan semua masalah penanganan COVID-19 ke kepala daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Pilkada 2020 bisa jadi ajang calon kepala daerah untuk munculkan solusi penanganan COVID-19. Namun di saat yang sama para kepala daerah pernah pernah terancam dipecat lewat instruksi Menteri Dalam Negeri jika dianggap gagal tangani wabah.



Pemerintah Daerah yang Serba Salah



16 Maret 2020

Anies batasi jumlah penumpang armada angkutan umum untuk jaga jarak.



21 Maret 2020

Anies salah satu kepala daerah yang paling awal tetapkan status tanggap darurat.



20 Maret 2020

Lukas Enembe ingin ambil opsi karantina wilayah atau lockdown sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan.



Pemerintah Pusat Selalu Benar



16 Maret 2020

Jokowi belum mengambil langkah apa pun hanyaimbau lakukan segala kegiatan di rumah.



23 Maret 2020

Jokowi tak mau menetapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown.



24 Maret 2020

Tito Karnavian tak setuju jika Papua terapkan lockdown.



30 Maret 2020

Anies hentikan operasi bus antarkota antarprovinsi (AKAP) agar mobilisasi warga disetop.



9 April 2020

Anies teken aturan hanya izin ojek online untuk barang, bukan penumpang.



9 September 2020

Anies tetapkan PSBB total untuk 14 September.



30 Maret 2020

Luhut Binsar Panjaitan anulir aturan Anies yang hentikan operasi bus AKAP.



9 April 2020

Luhut malah buat aturan yang izinkan ojek online angkut penumpang.



10 September 2020

Sejumlah menteri protes atas kebijakan Anies karena faktor ekonomi.



Junaedi adalah salah satu petugas gali kubur untuk jenazah COVID-19 yang ada di TPU Pondok Ranggan, Jakarta Timur. Ia mengaku kerja gali kubur saat pandemi jauh lebih berat dari kerja reguler.

“Kalau Kita Kena dan Mati, Siapa yang Kuburkan?”

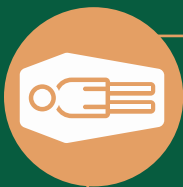
- 👤 **Penggali Kubur Jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur.**
- ❓ **Representasi dari penggali kubur pemakaman jenazah pasien COVID-19 di DKI Jakarta dan di kota-kota lain.**

Menjadi penggali kubur di masa pandemi artinya menjalani tugas yang berat akibat banyaknya korban yang terus berjatuh. Berbeda dengan menggali makam biasa, waktu dan prosedur pemakaman korban COVID-19 sangat ketat dan padat. Para penggali kubur TPU Pondok Ranggon, misalnya, kewalahan karena minimnya ketersediaan tenaga. Jenazah COVID-19 yang datang terlalu banyak.

Mereka bekerja dengan dukungan fasilitas yang tidak berlimpah dan diliputi kecemasan, bila mereka yang menguburkan jenazah COVID-19 bisa saja menularkan virus kepada keluarga di rumah. Mereka berusaha mengeliminasi kecemasan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, baju hazmat, sarung tangan, menjaga jarak, dan mencuci tangan baik dalam tugas maupun setelah bertugas. Namun, banyak di antara mereka yang memilih tidak pulang ke rumah, tidur di pos jaga TPU, dijauhi tetangga, hingga dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya.

Pemerintah DKI Jakarta telah mencoba berikan perhatian khusus bagi mereka. Dengan besarnya risiko pekerjaan tersebut, Pemerintah telah menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 juta per orang yang dibayarkan per bulan. Namun, berbeda dengan tenaga kesehatan, tidak ada aturan khusus secara nasional tentang insentif dan jaminan untuk para penggali kubur jenazah COVID-19.

Beda Nasib Para Penggali Kubur



Tidak ada aturan khusus secara nasional tentang insentif dan jaminan untuk para penggali kubur jenazah COVID-19. Berbeda dengan tenaga kesehatan.



DPR usul agar Menteri Kesehatan buat aturan secara nasional soal insentif bagi penggali, namun hanya ditampung.



Kepala Daerah punya aturan masing-masing. Semisal Wali Kota Padang, Sumatera Barat, yang memberi insentif Rp500 ribu untuk satu penggali yang tangani satu kasus.



Jumlah kapasitas makam COVID-19 di Jakarta: TPU Rorotan (1.500 petak), TPU Bambu Apus (800 petak), TPU Srengseng Sawah (1.900 petak), TPU Tegal Alur (800 petak), RTH Kramat Tiga (9.000 petak), RTH Pondok Gede (3.900 petak), TPU Pondok Rangon (4.649 petak), hingga TPU Bambu Wulung (1.500 petak).



Karena tak ada aturan secara nasional, akhirnya banyak kasus pembayaran insentif yang mangkrak hingga berbulan-bulan secara sporadis di berbagai daerah.



Februari 2021, Pemprov DKI siapkan lahan baru seluas 42 hektare untuk kapasitas 17.900 petak.



Irma adalah salah satu pendiri portal relawan LapoCovid-19. Latar belakang pendidikan master kesehatan publik dan ikut mendirikan Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI) membuat Irma fokus pada isu kesehatan.

“Negara Tak Berkutik saat Pandemi Jika Tanpa Relawan”

- 👤 **Relawan penanganan COVID-19 dan salah satu pendiri LaporCovid-19.**
- ❓ **Representasi dari berbagai kelompok relawan yang membantu penanganan COVID19 di Indonesia.**

Para relawan adalah orang-orang biasa dari kalangan masyarakat sipil yang berinisiatif ambil langkah konkret di saat negara tak jelas tangani wabah COVID-19. Terlepas dari ragam latar belakangnya, mereka bersedia menyisihkan tenaga, waktu, uang, hingga risiko untuk membantu penanganan pandemi secara sukarela—dan kerap kali tidak diapresiasi oleh negara. Mereka tidak akan turun tangan, jika negara bekerja dengan benar dan cakap dalam tangani wabah.

Salah satu contohnya adalah LaporCovid-19 yang dibentuk di awal Maret 2020, ketika kasus COVID-19 merebak dan ditemukan secara resmi. LaporCovid-19 membangun sebuah kanal laporan warga (citizen reporting platform) yang digunakan sebagai tempat berbagi informasi mengenai kejadian terkait COVID-19 yang ditemukan oleh warga, namun selama ini luput dari jangkauan pemerintah. Menggunakan pendekatan crowdsourcing yang melibatkan partisipasi warga untuk turut terlibat dalam pencatatan angka dan pelaporan isu seputar COVID-19 di sekitarnya, menjadi jembatan pencatatan angka kejadian COVID-19 di tanah air. LaporCovid-19 menjadi wadah untuk membantu pemerintah dan warga lain untuk mengetahui sebaran dan serta magnitudo COVID-19 di indonesia. Data yang terkumpul di kanal LaporCovid-19 menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan langkah penanganan COVID-19 yang berdasarkan data di lapangan.

Giat Para Relawan saat Negara Tak Cakap

LaporCovid-19 :



- Tampung informasi yang luput dari Pemerintah.
- Memetakan data riil kasus COVID-19.
- Kritis sebut banyak kabupaten tak buka data kematian.

KawalCOVID19 dan PandemicTalks :



- Kawal informasi dan data yang simpang siur.
- Mendesak transparansi Pemerintah.
- Advokasi kebijakan penanganan COVID-19.

Relawan Contact Tracer :



- 4.836 orang.
- Kerja berat tapi honor macet.
- Ramai bikin petisi karena insentif dua bulan tak dibayar.

Relawan Vaksinator :



- 31.000 orang.
- Satu vaksinator injeksi 30 orang per hari.
- Burnout kerja terlalu berat karena ambisi Presiden ingin cepat selesaikan vaksinasi.

Relawan Wisma Atlet :



- 532 orang.
- Keletihan, dapat stigma buruk, bertaruh nyawa di zona merah.

Gerakan Sipil :



- Relawan gugat Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tetap laksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi.
- Relawan menentang langkah vaksinasi mandiri untuk para pengusaha.
- Di Bandung, Relawan pikul jenazah COVID-19 mogok kerja karena merasa mendapat komentar yang tidak pantas oleh para warga dan Wali Kota Bandung-nya sendiri.



Remy adalah Koordinator Pusat BEM SI periode 2019-2020. Ia juga merupakan mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang kerap muncul saat protes mahasiswa sejak demo Reformasi Dikorupsi.

“Kami Dipukuli, Hidung Patah, Gigi Retak”

- 👤 **Mahasiswa. Koordinator Pusat BEM SI.**
- ❓ **Representasi dari ribuan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja di seluruh Indonesia.**

Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat di masa pandemi. Slogan mosi tidak percaya disuarakan kepada Pemerintah dan DPR. Mereka menilai Pemerintah dan DPR berpotensi menggerus hak hidup rakyat dan lingkungan karena mengesahkan Omnibus Law. Mahasiswa juga menilai Pemerintah gagal menanggulangi pandemi COVID-19 yang mewabah di tanah air. Walaupun berdemo, mereka selalu berusaha memastikan peserta aksi untuk jaga jarak, bagikan masker, hingga melarang mahasiswa dengan kondisi kurang sehat untuk mengikuti aksi.

Namun, aksi mahasiswa tersebut disambut dengan berbagai tindak kekerasan oleh polisi dan aparat keamanan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020, melalui beragam tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di berbagai kota, termasuk penangkapan ribuan pengunjuk rasa selama tiga hari rangkaian aksi protes.



Mahasiswa penolak Omnibus Law direpresi :

Nadiem imbau mahasiswa untuk tidak turun aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat bertolak belakang dengan jargon "Kampus Merdeka"-nya.





Jumisih adalah juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang getol menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dia juga merupakan Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dan pendiri Radio Buruh Perempuan Marsinah FM.

“Kita Dibuang Seperti Sampah”

- 👤 **Buruh dan juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).**
- ❓ **Representasi dari ribuan buruh yang dirugikan dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.**

Buruh atau pekerja menjadi salah satu elemen yang paling terdampak karena pandemi COVID-19, terutama buruh perempuan yang memiliki beban ganda. Jutaan orang di-PHK, dirumahkan, subsidi disetop, upah boleh dipotong, THR dicicil, hingga iuran BPJS Kesehatan naik.

Bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya, ribuan buruh juga menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat—termasuk buruh—di masa pandemi. Mereka menuntut Presiden keluaran Perppu untuk batalkan Omnibus Law.

Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam GEBRAK sempat mewacanakan mogok nasional. Opsi itu diutarakan karena Presiden Jokowi tidak kunjung mendengar suara buruh untuk mencabut draf RUU Cipta Kerja. Mereka juga menolak Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang tidak adanya kenaikan upah 2021.

Kaum Buruh Ambyar di Tengah Pandemi



Karena Pandemi :

- ⚙ Buruh perempuan yang memiliki beban ganda.
- ⚙ Jutaan orang di-PHK.
- ⚙ Dirumahkan.
- ⚙ Subsidi disetop.
- ⚙ Upah boleh dipotong.
- ⚙ THR dicicil.
- ⚙ Iuran BPJS Kesehatan naik.
- ⚙ Sulit akses kartu pra kerja usai di-PHK.

Menaker:

Total 29,12 juta orang angkatan kerja terdampak pandemi COVID-19.



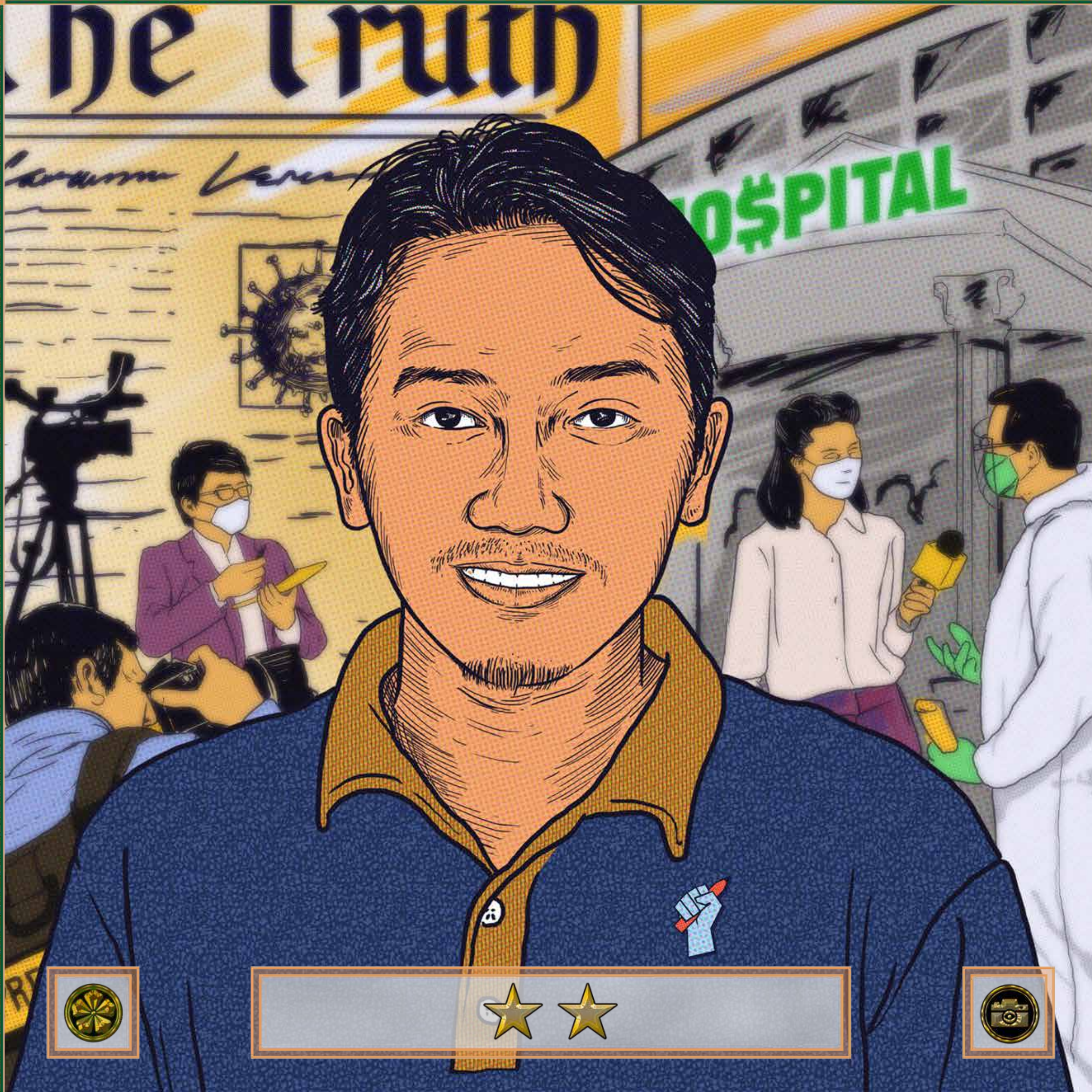
Ragam Sektor :

- ⚙ Pekerja kasar di pabrik.
- ⚙ Pekerja lepas.
- ⚙ Buruh migran.
- ⚙ Hingga 2.600 karyawan Lion Air Group yang 'dibuang begitu saja'.



Buruh Tolak Omnibus Law :

- ⚙ Berlangsung tiga hari, 6-8 Oktober 2020
- ⚙ Total lima juta massa buruh turun ke jalan.
- ⚙ 25 provinsi.
- ⚙ 300 kabupaten dan kota.



Haris adalah jurnalis Harian Kompas sejak 2012 yang saat ini bekerja di Yogyakarta. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret ini tergabung dalam kolaborasi investigasi membongkar kegagalan data penanganan COVID-19 di Yogyakarta.

“Jurnalis Sayang, Jurnalis Malang”

- 👤 **Jurnalis Harian Kompas di Yogyakarta.**
- ❓ **Representasi dari tidak kurang 17.000 jurnalis tersertifikasi di Indonesia yang terdampak pandemi.**

Jurnalis menjadi salah satu profesi yang paling terdampak oleh pandemi. Tak semua perusahaan pers mengizinkan para wartawannya untuk kerja di rumah, banyak pula yang tetap harus meliput ke lapangan di tengah ancaman COVID-19. Belum lagi beban psikologis saat meliput para korban COVID-19. Jurnalis rentan mengalami depresi. Padahal Dewan Pers sendiri mengakui bahwa peran jurnalis sangat penting di tengah pandemi untuk memberikan informasi yang jernih ke publik. Jurnalis menjadi garda terdepan melawan hoaks hingga diskursus negara. Mereka dibutuhkan publik untuk bisa melaporkan fakta dengan jelas tanpa dihalang-halangi. Tanpa jurnalis, negara akan selalu memonopoli informasi.

Kolaborasi jurnalis investigasi membongkar kegagalan data penanganan COVID-19 di Yogyakarta. Penyajian data penanganan COVID-19 di Indonesia, terutama di daerah, kerap tidak transparan, berbeda-beda, dan diduga berbeda jauh dari kondisi riil. Mereka mengaku sering mendapat laporan dari warga mengenai sulitnya mengakses kamar rumah sakit karena selalu penuh. Namun, di saat yang bersamaan, Pemda DIY mengklaim bahwa kamar rumah sakit selalu tersedia. Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai gerah dan merespons pemberitaan investigasi tersebut dengan melakukan rapat mendadak dengan para bupati dan wali kota.

Laporan LBH Pers terkait kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2020 :



117 kasus.



2 kasus dilakukan oleh militer.



Naik signifikan 32 persen dibanding 2019.



12 kasus dilakukan oleh anonim.



Kekerasan fisik dan kekerasan siber.



71 kasus terjadi saat protes besar Omnibus Law UU Cipta Kerja.



76 kasus dilakukan oleh polisi.



99 orang jurnalis mengalami kekerasan.



Ridwan sudah menjadi pengemudi ojek pangkalan di Jakarta sejak 2010. Namun, saat baru bekerja sebagai pengemudi ojek daring, pandemi merebak.




“Tak Ada Pilihan Selain Turun ke Jalan”

- 👤 **Pengemudi ojek online (ojol).**
- ❓ **Representasi tidak kurang dari 4 juta pengemudi ojol yang tercatat oleh Gabungan Transportasi Roda Dua (GARDA).**






Pengemudi ojek online adalah ujung tombak dan penyangga ekonomi bagi warga yang bisa melakukan kerja dari rumah (work from home)—konsep yang diimbau oleh Presiden. Karena mereka, kebutuhan sehari-hari warga yang memiliki privilese untuk bekerja di rumah bisa terpenuhi: makanan, minuman, hingga antar barang. Perputaran ekonomi tetap terjadi. Mereka tak bisa kerja dari rumah. Saat pandemi COVID-19 menghantui, mereka terpaksa turun ke jalan untuk bertahan hidup. Hampir semua pengemudi yang datang dari warga kelas bawah dan punya tanggungan: cicilan utang, listrik token, hingga uang sewa kontrakan. Pemprov DKI Jakarta menilai keberadaan pengemudi ojek daring seperti mitra Gojek dan Grab membantu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.

Riset Google dan Temasek pada November 2020 lalu, menyebut ada perpindahan belanja daring yang masif ke ranah makanan dan bahan pangan hingga 34 persen di negara-negara Asia Tenggara—salah satunya Indonesia. Dengan ada kebijakan di rumah saat pandemi dan penggunaan belanja daring lewat perusahaan, seperti Grab dan Gojek, riset MomentumWorks menemukan adanya perputaran ekonomi hingga 3,7 miliar dolar Amerika Serikat—hanya di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya dilindungi negara.





Driver Ojol yang Rentan di Tengah Pandemi

-  → Tak ada data resmi. Informasi terkini dari Gabungan Transportasi Roda Dua (GARDA) sebut jumlah pengemudi ojek online di Indonesia tak kurang dari 4 juta orang.
-  → Pendapatan turun hingga 90 persen saat pandemi.
-  → Curi siasat pindah wilayah operasi ke daerah yang memperbolehkan mengangkut penumpang.

Nasib Buruk Driver Ojol :

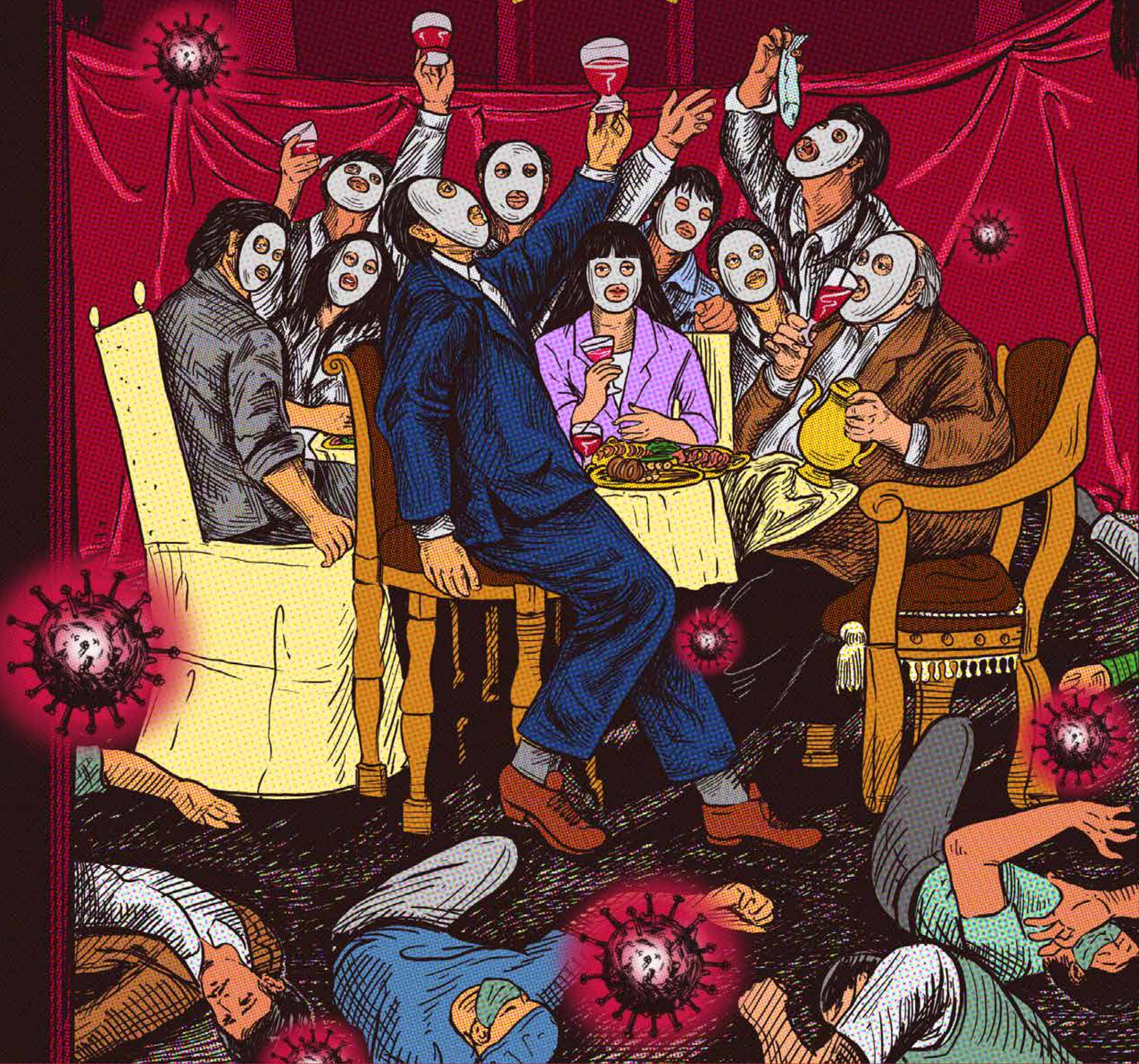
-  Diusir dari kontrakan karena tak mampu bayar.
-  Tak ada saat keluarga masuk rumah sakit.
-  Bunuh diri karena tak bisa bayar cicilan.
-  Ditipu pesanan fiktif hingga jutaan rupiah.
-  Tidur di emperan toko.

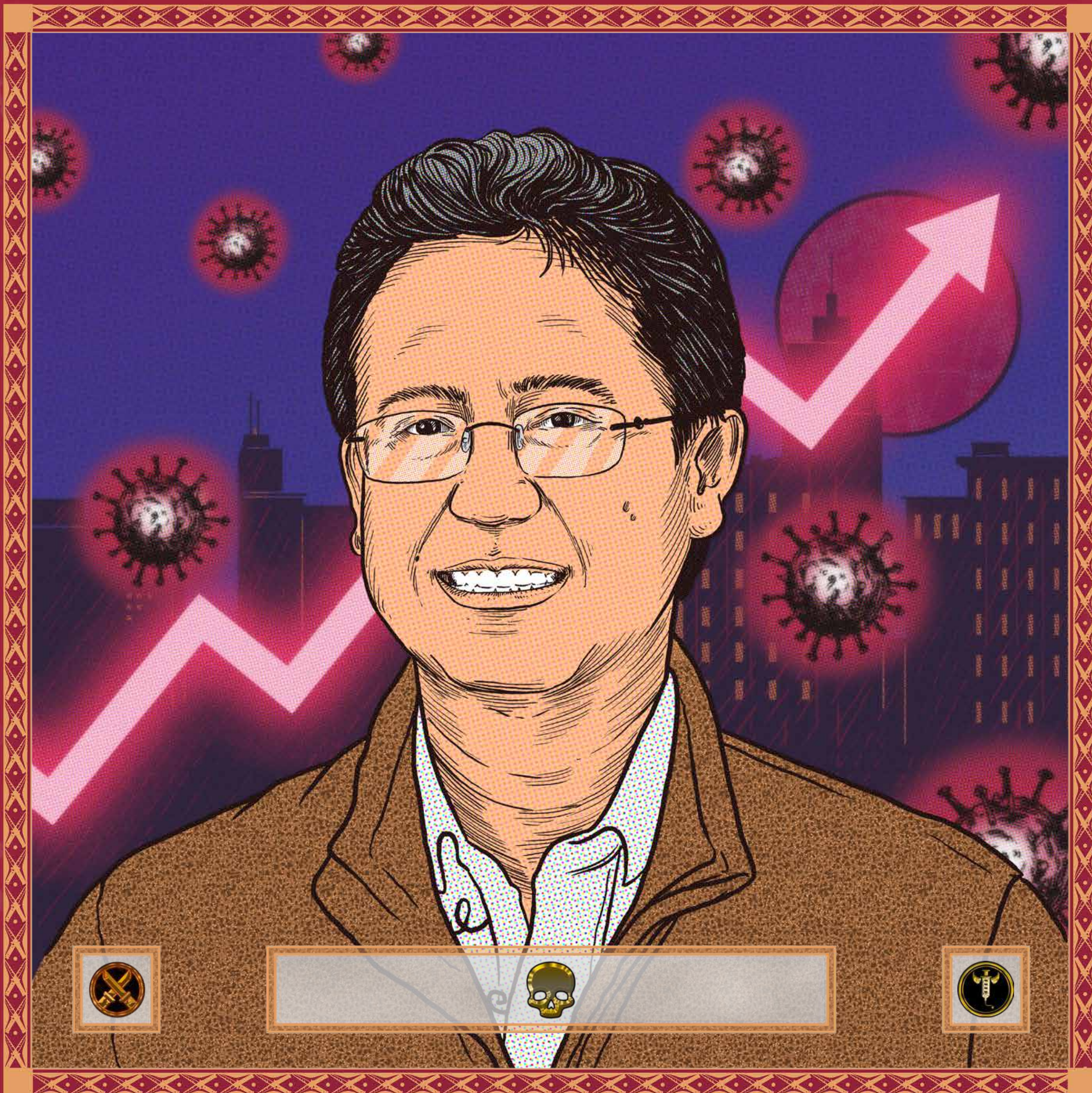
Digocek Negara dan Pengusaha :

-  Tak ada upah dan jaminan karena berstatus mitra.
-  Insentif dan BLT dari Pemerintah pun tak jelas.
-  Terimbas tarik-ulurnya kebijakan transportasi online Anies dan Luhut.
-  Didaftarkan ke program Kartu Pra Kerja yang menuai kontroversi.



The
BAD





Budi adalah Menteri Kesehatan yang menggantikan Terawan Agus Putranto sejak 2020. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN dan berlanjut menjadi Wakil Menteri BUMN.

“Saya Kapok dan Tak Mau Lagi Pakai Data Kemenkes”



Mantan Wakil Menteri BUMN dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Budi Gunadi Sadikin adalah salah satu pejabat publik yang banyak melakukan hal konkret tanpa perlu sorotan publik dan media, terutama saat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Saat itu, Budi getol mencari peluang pasokan vaksin dari berbagai negara, sejak September 2020. Budi juga mendatangi beberapa perusahaan di China, Amerika Serikat, dan Jerman. Ia juga datang ke markas WHO di Jenewa pada Oktober.

Usai diangkat menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto, Budi juga langsung berinisiatif rapat dengan berbagai kelompok dan koalisi masyarakat sipil yang fokus ke isu kesehatan selama penanganan pandemi COVID-19, seperti KawalCOVID19, LaporanCOVID-19, PandemicTalks, dan CISDI. Pertemuan dengan masyarakat sipil tak pernah terjadi sebelumnya saat lembaga dipimpin oleh Terawan. Ia seperti mencuci tumpukan piring kotor yang ditinggalkan Terawan sejak awal penanganan pandemi.

Sayangnya, Budi juga menjadi pejabat yang setuju dengan adanya vaksinasi mandiri untuk para pengusaha serta mengeluarkan peraturannya. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai Budi belum bisa menangani kasus COVID-19 di Indonesia karena angka kasus positif COVID-19 yang terus meningkat. Di awal jabatannya, Budi juga memicu kontroversi dengan menyatakan dirinya sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan memilih menggunakan data KPU.

Cuap-Cuap Budi Gunadi Sadikin

► 17 November 2020

"Mohon maaf sekali lagi dari Pak Menteri [Erick Thohir] juga tadi malam di confirmed seluruh lantai kami ada beberapa staf inti Pak Menteri dan saya yang positif COVID-19. Sehingga atas arahan dokter kami harus melakukan WFH atau isolasi mandiri. Jadi mohon maaf sekali bapak ibu karena memang agak mendadak kejadiannya."

► 11 Desember 2020

"Sejak September Indonesia telah mendekati semua perusahaan vaksin yang ada, dan kami mengambil sembilan perusahaan saja yang telah melewati uji klinis tahap ketiga. Empat perusahaan dari China yaitu Sinopharm Wuhan, Sinopharm Beijing, Sinovac, CanSino. Lalu tiga dari AS yaitu Johnson Pharmaceutical, Novavax, dan Moderna. Berikutnya satu di Jerman yaitu BioTech-Pfizer. Dan yang terakhir satu dari London yaitu Oxford yang bekerja sama dengan AstraZeneca."

► 23 Desember 2020

"Target jangka pendek, untuk segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Saya ingin memastikan semua alatnya siap."

► 29 Desember 2020

"Yang pertama ingin saya sampaikan, saya baru ter-update empat hari ini sebagai menteri bahwa sudah ada 507 tenaga kerja kesehatan yang wafat pada masa pandemi Covid-19 ini. Saya doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan."

► 22 Januari 2021

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes."

► 20 Februari 2021

"Artinya tetap berjalan di koridor-koridor tersebut, namun juga memberikan fleksibilitas untuk teman-teman di pihak swasta yang merasa mereka memiliki kewajiban sosial untuk bergotong royong dengan pemerintah melakukan vaksinasi ini agar seluruh rakyat Indonesia bisa berpartisipasi."



Belva merupakan CEO Ruangguru sejak 2016 lalu, sedangkan Andi Taufan adalah CEO Amartha yang didirikan pada 2010. Angkie merupakan pendiri Thisable Enterprise dan juga kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Amin sendiri merupakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016. Mereka diumumkan sebagai staf khusus milenial oleh Presiden Joko Widodo pada 21 November 2019.

“Milenial dan Kolonial Sama Saja, Soal Uang lupa Segalanya”



Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo

Tujuh orang anak muda yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi staf khusus seharusnya bisa melakukan banyak hal konkret untuk membantu negara di tengah pandemi. Mereka adalah segelintir anak muda yang punya kesempatan dan posisi strategis untuk lakukan hal-hal substansif. Minimal memaparkan gagasan dan target kerja hingga 2024 mendatang—sesuatu yang tak mereka lakukan.

Selama ini, justru mereka lebih banyak terjebak dalam pusaran birokrasi dan terlibat dalam konflik kepentingan mereka sendiri: memerintahkan mahasiswa, melibatkan perusahaan pribadi untuk program pemerintah, hingga ragam blunder lainnya. Karena terlibat banyak konflik kepentingan, mantan pimpinan KPK sampai sebut tak ada bedanya dengan kolonial. Menurut INDEF, sentimen terhadap staf khusus milenial sangat ekstrem, yaitu mencapai 94,97 persen bersifat negatif. Maka tak heran banyak pihak yang mendesak agar staf khusus milenial dibubarkan saja.

Staf Khusus dalam Pusaran Kepentingan

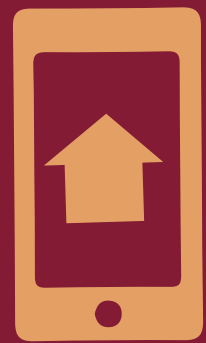


Rekam Jejak Staf Khusus :

- **21 November 2019**
Pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo.
- **15 Maret 2020**
Angkie Yudistia sebar hoaks dengan menyebut tarik nafas selama 10 detik bisa deteksi COVID-19.
- **20 Maret 2020**
Pemerintah rilis program Kartu Pra Kerja sebagai bentuk bantuan kepada mereka yang terimbas pandemi, Ruangguru salah satu lembaga pelatihannya.
- **23 Maret 2020**
Belva Devara minta publik tidak mem-bully kinerja Pemerintah.
- **1 April 2020**
Andi Taufan Garuda Putra kirim surat dengan kop Sekretariat Kabinet ke seluruh camat se-Indonesia untuk kerja sama dengan perusahaannya.
- **15 April 2020**
Belva Devara mundur karena derasnya kritikan konflik kepentingan dirinya sebagai CEO Ruangguru.
- **24 April 2020**
Andi Taufan mundur karena derasnya kritikan konflik kepentingan dirinya sebagai CEO Amartha.
- **4 September 2020**
Ruangguru mundur dari penyedia platform digital Kartu Prakerja.
- **6 November 2020**
Aminuddin Maruf perintahkan perwakilan mahasiswa ke Istana Negara untuk bahas Omnibus Law.



Ruangguru Bermasalah :



Selain menjadi platform digital dalam waktu yang bersamaan juga menjadi lembaga pelatihan.



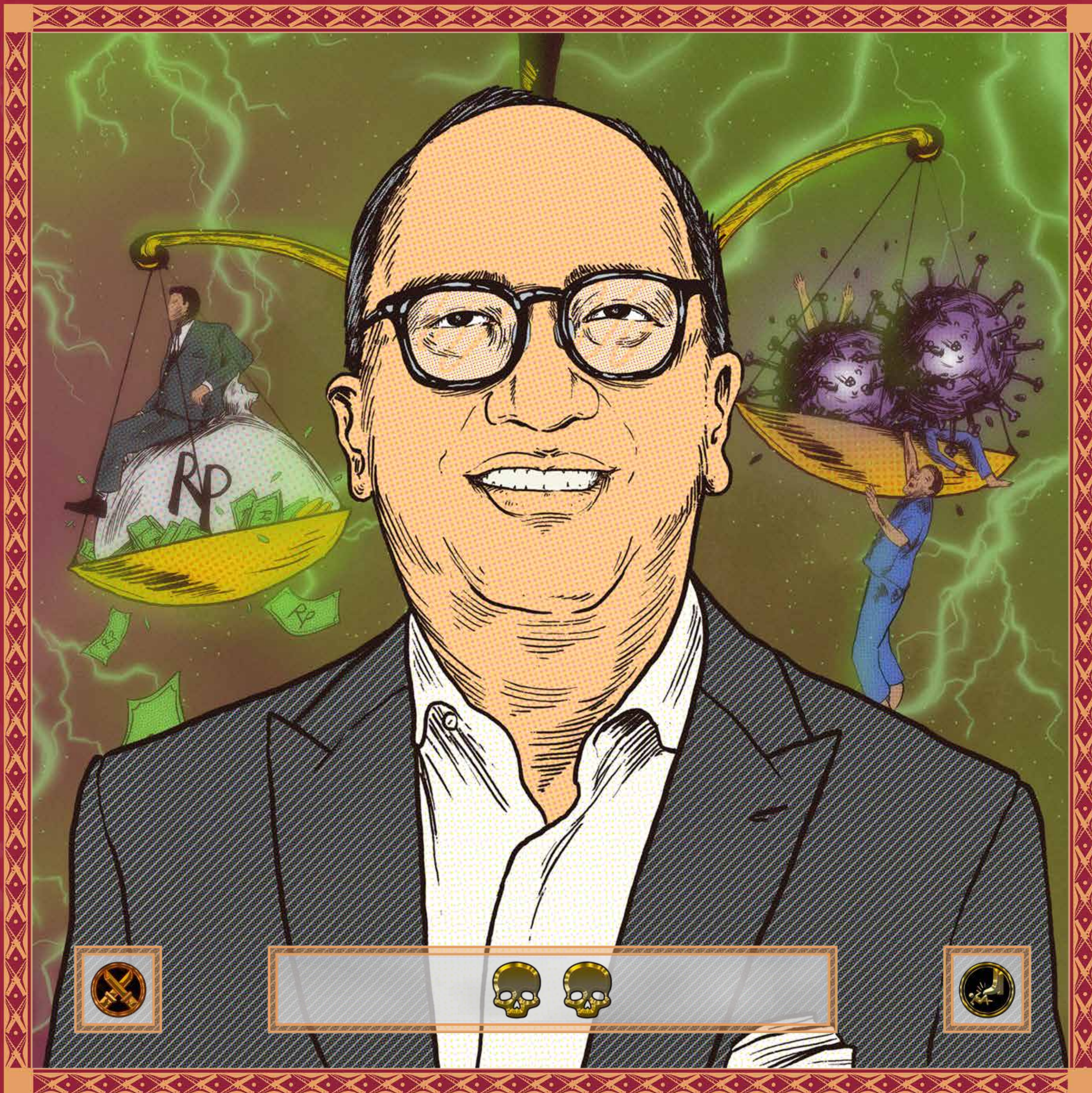
Mendominasi jumlah pelatihan yaitu 42 jenis.



Potensi untung yang diraup dari Kartu Pra Kerja sebesar Rp457 miliar.



Pelatihannya mahal, tidak relevan, dan pernah mencuri bahan materi guru.



Rosan adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) periode 2015-2020. Periode sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan dan Finansial KADIN. Belakangan ia diketahui menjadi salah satu pemilik mayoritas saham klub sepakbola Italia, Inter Milan.

“Kami Ingin Vaksinasi Mandiri”



Kepala KADIN periode 2015-2020

Ketua KADIN, Rosan Roeslani, menargetkan program vaksinasi mandiri bisa dimulai pada minggu ketiga Mei 2021. Berdasarkan pendataan program Vaksinasi Gotong Royong yang dibuka sejak 28 Januari hingga 10 April 2021, KADIN mencatat sebanyak 17.387 perusahaan telah mendaftar dengan 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. Inisiatif vaksinasi mandiri ini dikritik masyarakat sipil dan epidemiolog karena pasti akan mengacaukan skema vaksinasi yang telah dirancang, saat semua sumber daya vaksinasi di Indonesia sedang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok prioritas.

Padahal, ada cara lain yang bisa dilakukan pengusaha untuk bantu Pemerintah, semisal memperketat pelacakan kepada seluruh karyawannya. Hal tersebut akan mempermudah dan mempercepat terputusnya penyebaran COVID-19.

Di luar isu vaksinasi mandiri, KADIN selalu mendesak berbagai kebijakan Pemerintah agar prioritaskan aktivitas ekonomi ketimbang kesehatan publik. Selama pandemi, pengusaha pernah mengeluh karena stimulus ekonomi untuk pengusaha agar tidak PHK karyawan dinilai kurang. Mereka minta harusnya stimulus sampai Rp1.600 triliun.



Cawe-Cawe Vaksinasi Mandiri



● 14 Januari 2021

KADIN minta izin untuk dilibatkan dalam vaksinasi mandiri.

● 10 Februari 2021

Jokowi revisi aturan vaksinasi, memungkinkan pelibatan pihak swasta.

● 14 Februari 2021

Kemenkes sebut mendukung rencana vaksinasi mandiri.

● 15 Februari 2021

Epidemiolog khawatir vaksin gratis akan terganggu karena stok terbatas.

● 16 Februari 2021

LaporCovid-19 sebut ada potensi korupsi dalam vaksinasi mandiri.

● 16 Februari 2021

Muncul petisi publik untuk meminta vaksinasi mandiri dibatalkan.

● 18 Februari 2021

Epidemiolog minta rencana vaksinasi mandiri dibatalkan demi kesehatan publik.

● 24 Februari 2021

Menkes terbitkan aturan vaksinasi mandiri gratis untuk karyawan perusahaan.



Wiko adalah juru bicara Satgas COVID-19, yang menggantikan Achmad Yuriyanto pada 21 Juli 2020. Sebelumnya, dia adalah Ketua Tim Pakar Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Wiku pernah menjadi anggota Panel Ahli Komisi & Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza periode 2008-2010 dan menjabat sebagai Direktur Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis UI periode 2007-2012.

“Data di Pemerintah Pusat Beda dengan Kami”



Juru Bicara Satgas COVID-19

Bulan Mei 2020, Tim Perumus Policy Brief Kajian Regulasi dari Universitas Indonesia (UI) menuntut Pemerintah lebih transparan dalam mempublikasikan data situasi pandemi COVID-19. Namun, sebelas bulan setelah pandemi, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui masih adanya pencatatan data Covid-19 yang mengalami keterlambatan. Satgas mengakui tidak mudah untuk menyatukan data COVID-19 milik pemerintah pusat dan daerah. Konteks satu data ini, sejak dari awal penanganan sudah dikembangkan, tetapi memang tidak mudah. Itu menyebabkan data perkembangan kasus yang muncul belum mampu menggambarkan situasi yang sebenarnya.

Namun, sebenarnya secara teknis penyatuan data pusat dan daerah bukan perkara sulit. Ia menjadi sulit saat banyak kepentingan yang bermain terhadap data tersebut—terutama kepentingan ekonomi dan politik.

Sebelumnya, beberapa pemerintah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua, sempat mempertanyakan perbedaan data di pusat dan daerah yang bisa membuat publik mempertanyakan keakuratan data yang dipublikasikan. Tidak mengherankan jika selama penanganan pandemi wabah, Satgas COVID-19 justru menjadi titik lemah untuk konsolidasi dan integrasi data-data COVID-19. Padahal, data-data itu penting untuk menentukan apa langkah kedepannya yang akan dilakukan. Dengan data yang tidak realtime maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif



Yang Bermasalah Adalah Data yang Tak Akurat

► 14 April 2020

Muhadjir Effendy klaim akan segera memperbaiki sistem pendataan COVID-19.

► 18 April 2020

Perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah makin banyak.

► 4 Juli 2020

Terungkap data kematian mencapai 13.000, jauh lebih tinggi dari yang diumumkan juru bicara.

► 19 September 2020

Juru bicara tak pernah jelaskan jumlah kematian dengan protokol COVID-19 angkanya lebih tinggi dari yang diumumkan.

► 1 Desember 2020

Juru bicara klaim masih sinkronisasi data terkait beda angka dengan Pemerintah Daerah.

► 21 Desember 2020

Juru bicara klaim masih sempurnakan sistem data terkait beda angka kematian.

► 2 Februari 2021

Juru bicara mengaku masih ada pencatatan data yang terlambat.

► 4 Februari 2021

Luhut mengaku dua juta kasus COVID-19 tak tercatat di data nasional.

► 3 Maret 2021

Juru bicara mengaku tak mudah satukan data pusat dan daerah.



Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden yang menjabat sejak 2018 lalu. Dia juga merupakan mantan Panglima TNI, yang setelahnya sempat menjadi kader dan elite Partai Hanura.

“Suruh Belajar Sini Dululah Bloomberg Itu!”



Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)

Moeldoko adalah salah satu pejabat di dalam kabinet yang paling getol mendukung dan menyuarakan Omnibus Law UU Cipta Kerja—aturan sapu jagat yang digarap kebut waktu dan ditolak publik. Ia juga mempunyai rekam jejak yang buruk dalam menyikapi penanganan pandemi COVID-19. Moeldoko pernah menuding rumah sakit memanipulasi data positif COVID-19. Tak hanya itu, Moeldoko juga pernah meremehkan peneliti mengenai prediksi COVID-19 di Indonesia. Dia menilai prediksi Bloomberg bahwa pandemi di Indonesia hanya akan berakhir setelah sepuluh tahun karena laju vaksinasi yang lambat adalah berlebihan. Di sisi lain, Moeldoko malah merupakan salah satu pejabat yang setuju TNI dan Polri dilibatkan dalam penanganan pandemi.

Moeldoko mengaku, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah memikirkan upaya agar vaksinasi rampung dalam 1,5 tahun. Di sisi lain, saat pandemi jauh dari usai, sejak awal 2021, Moeldoko malah cawe-cawe politik dengan ikut dalam upaya menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mendukung Kongres Luar Biasa (KLB). Belakangan, ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Ragam Blunder Sang Panglima

▶ 23 Juli 2020



"Nanti tinggal penggunaannya saja. Kalau kesehatan maka Pak Doni bisa minta TNI-Polri. Di daerah, para gubernur juga bisa minta TNI-Polri back up. Semua bisa berjalan baik."

▶ 1 Oktober 2020



"Jangan sampai semua kematian pasien itu selalu dikatakan akibat COVID-19."

▶ 28 Oktober 2020



"Jangan sampai anak-anak muda terprovokasi hasutan atau ajakan yang dia sendiri tidak paham [Omnibus Law]."

▶ 3 Februari 2021

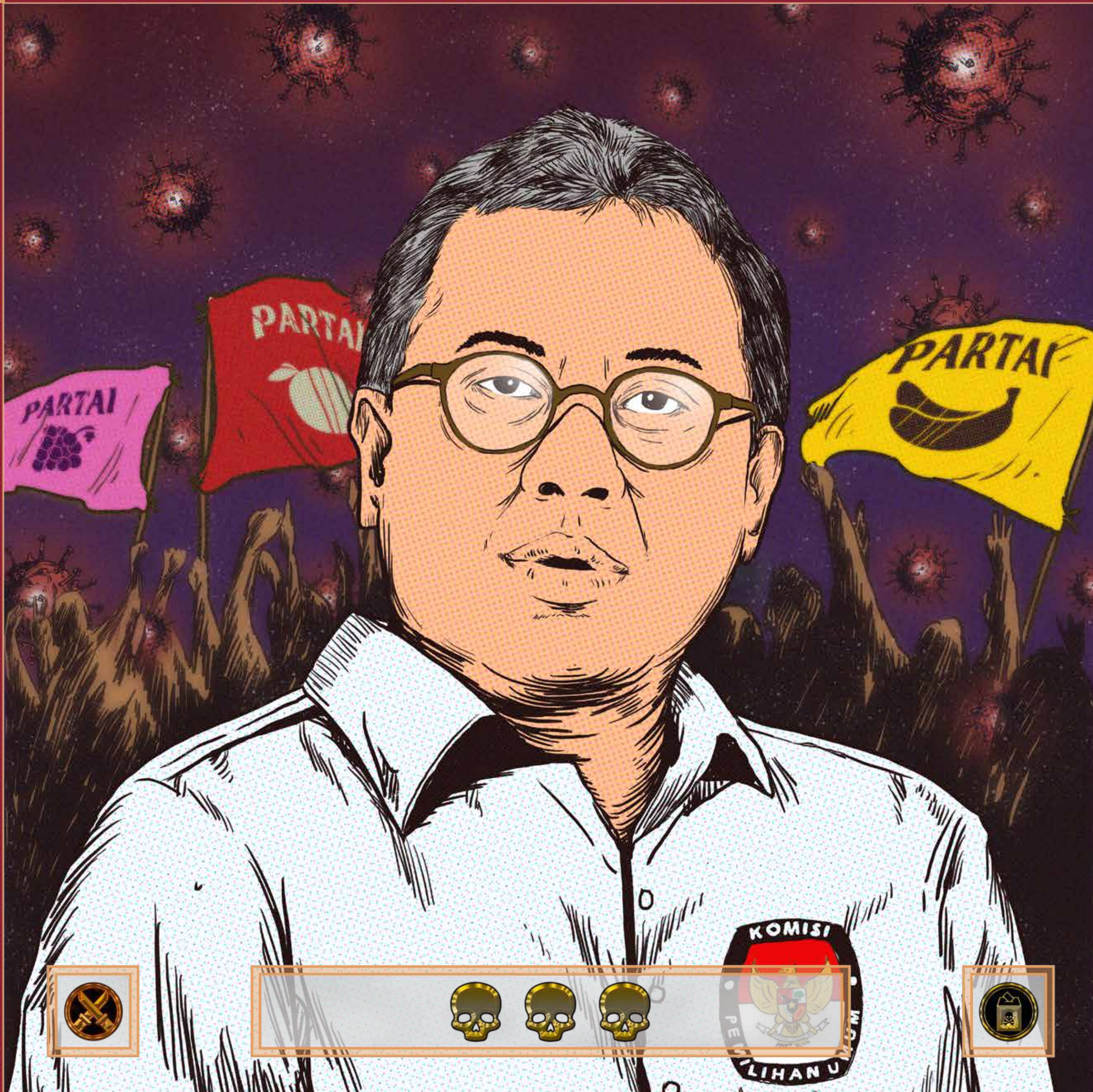


"Moeldoko mau kudeta? Lah kudeta apa. Anggaplah saya punya senjata, Panglima TNI pingin jadi Ketua Demokrat. Emang bisa gua todong senjata para DPC, DPD, 'eh datang sini, gua todong senjata!'"

▶ 7 Februari 2021



"Suruh belajar ke sini dulu lah Bloomberg itu!"



Arief adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada periode 2017-2021—saat Pilkada 2020 di tengah pandemi. Ia sebelumnya juga merupakan komisioner KPU RI pada periode 2012-2017.

“Kami Pastikan Pasien COVID-19 Coblos untuk Pilkada”



Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2021.

Arief Budiman adalah salah satu pejabat negara yang setuju pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang belum mereda. KPU beralasan bahwa mereka tidak bisa mengubah undang-undang dan keputusan tersebut merupakan kebijakan politik kolektif antara Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu. Tidak hanya menyetujui, KPU sempat memperbolehkan konser kampanye di tengah pandemi dan ‘memaksa’ pasien positif COVID-19 untuk memilih dengan mendatangkan kotak pencoblosan ke rumah sakit. Keputusan ini berseberangan dengan rekomendasi lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) bagi penundaan Pilkada. Setidaknya ada 12 pertimbangan dari LIPI terkait betapa perlunya pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda di antaranya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan pelanggaran kemanusiaan akibat terabaikannya aspek-aspek keselamatan manusia.

Karena tetap memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, akibatnya penanganan COVID-19 di Indonesia amburadul. Negara mementingkan syahwat politik ketimbang kesehatan publik.



Politik Lebih Penting dari Kesehatan

● 21 Maret 2020

KPU tetapkan penundaan tahapan Pilkada 2020 karena COVID-19.

● 14 April 2020

Pemerintah tetapkan Pilkada jadi 9 Desember. Awalnya 23 September.

● 28 Mei 2020

Kementerian Dalam Negeri tak mau tunda Pilkada hingga usai COVID-19.

● 4 Juni 2020

Menteri Dalam Negeri tegaskan tak akan tunda Pilkada 2020.

● 15 September 2020

KPU sempat izinkan konser untuk kampanye Pilkada 2020.

● 21 September 2020

Jokowi tegaskan tak akan tunda Pilkada dan tetap 9 Desember.

● 23 September 2020

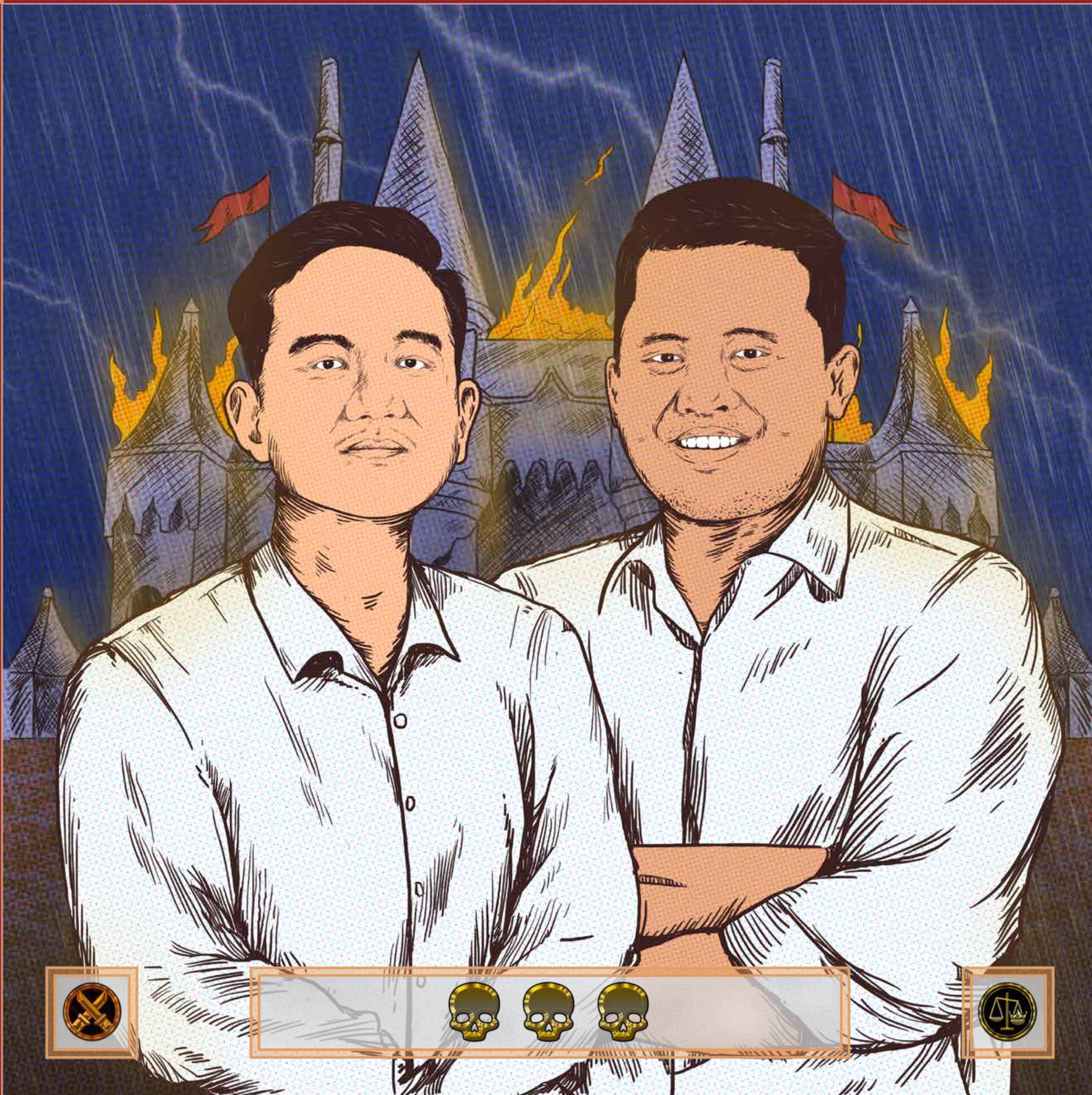
KPU batalkan izin konser untuk kampanye Pilkada 2020.

● 2 Desember 2020

KPU sebut pasien COVID-19 yang dirawat akan diminta nyoblos.

● 9 Desember 2020

Pelaksanaan Pilkada 2020.



Gibran adalah putra dari Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo yang menjabat sejak 2021. Sebelumnya ia dikenal sebagai pengusaha catering, yang pada 2019 mendaftarkan diri sebagai kader PDIP. Begitu juga dengan Bobby. Menantu Jokowi tersebut menjabat sebagai Wali Kota Medan sejak 2021, yang baru menjadi kader PDIP dua tahun sebelumnya.

“[Gibran] Sudah Enggak Ada Kesempatan”



Keluarga Presiden Joko Widodo

Gibran dan Bobby mau terjun ke Pilkada 2020 diusung oleh PDIP, tanpa kaderisasi politik yang lama dan melangkahi banyak kader senior. Naiknya Gibran dan Bobby munculkan fenomena dinasti politik karena posisi ayah dan mertua sebagai Presiden yang masih menjabat aktif. Mereka menggunakan konflik kepentingan untuk melayani dirinya sendiri.

Posisi Gibran dan Bobby sangat diuntungkan untuk menang. Jokowi disebut sebagai presiden Indonesia pertama yang menjabat berbarengan dengan putra dan menantunya sebagai kepala daerah. Di tangan Jokowi, demokrasi Indonesia berjalan semakin semu karena hanya orang-orang lingkaran terdekat yang berpotensi mendapatkan kekuasaan.

Ada indikasi dan dugaan kuat bahwa Pilkada 2020 tetap berjalan di tengah pandemi karena ada dua orang keluarga Jokowi ini. Seharusnya Gibran dan Bobby bisa menolak dicalonkan untuk Pilkada 2020. Apalagi, Jokowi sudah menyebut tegas itu merupakan hak keduanya untuk memutuskan. Andai mereka tak mau ikut, tentu Pilkada 2020 mungkin tak akan terjadi dan penanganan pandemi bisa jadi lebih baik.



Hikayat Gibran

3 September 2018

Gibran klaim tak tertarik di dunia politik.

23 September 2019

Gibran daftar jadi kader PDIP.

24 September 2019

Bertemu dengan Megawati. Lobi untuk Pilkada 2020.

8 Januari 2020

PDIP Jawa Tengah sebut cari penyakit jika Gibran tak lolos seleksi partai.

16 Juli 2020

PDIP resmi usung Gibran di Pilkada 2020, kendati menerabas banyak aturan partai.



Hikayat Bobby

8 Desember 2018

Bobby sebut belum mau terjun ke politik.

3 Desember 2019

Daftar jadi kader PDIP untuk maju ke Pilkada 2020.

8 Januari 2020

Politikus senior PDIP Medan menolak mendukung Bobby.

11 Agustus 2020

PDIP resmi usung Bobby di Pilkada 2020, kendati menerabas banyak aturan partai.

18 Agustus 2020

Bobby sebut akan tetap turun ke lapangan saat kampanye.



Hikayat Gibran

6 November 2020

Gibran minim solusi konkret saat debat terbuka.

19 November 2020

Gibran minta warga tak takut datang ke TPS untuk nyoblos.

7 Desember 2020

Total kekayaan Gibran menyentuh Rp21,15 miliar.

9 Desember 2020

Gibran menang Pilkada Solo.



Hikayat Bobby

26 September 2020

Bobby langgar protokol COVID-19 saat kampanye.

8 Desember 2020

Harta Bobby sampai Rp54,86 miliar. Bisnisnya terafiliasi dengan sebuah perusahaan tambang di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

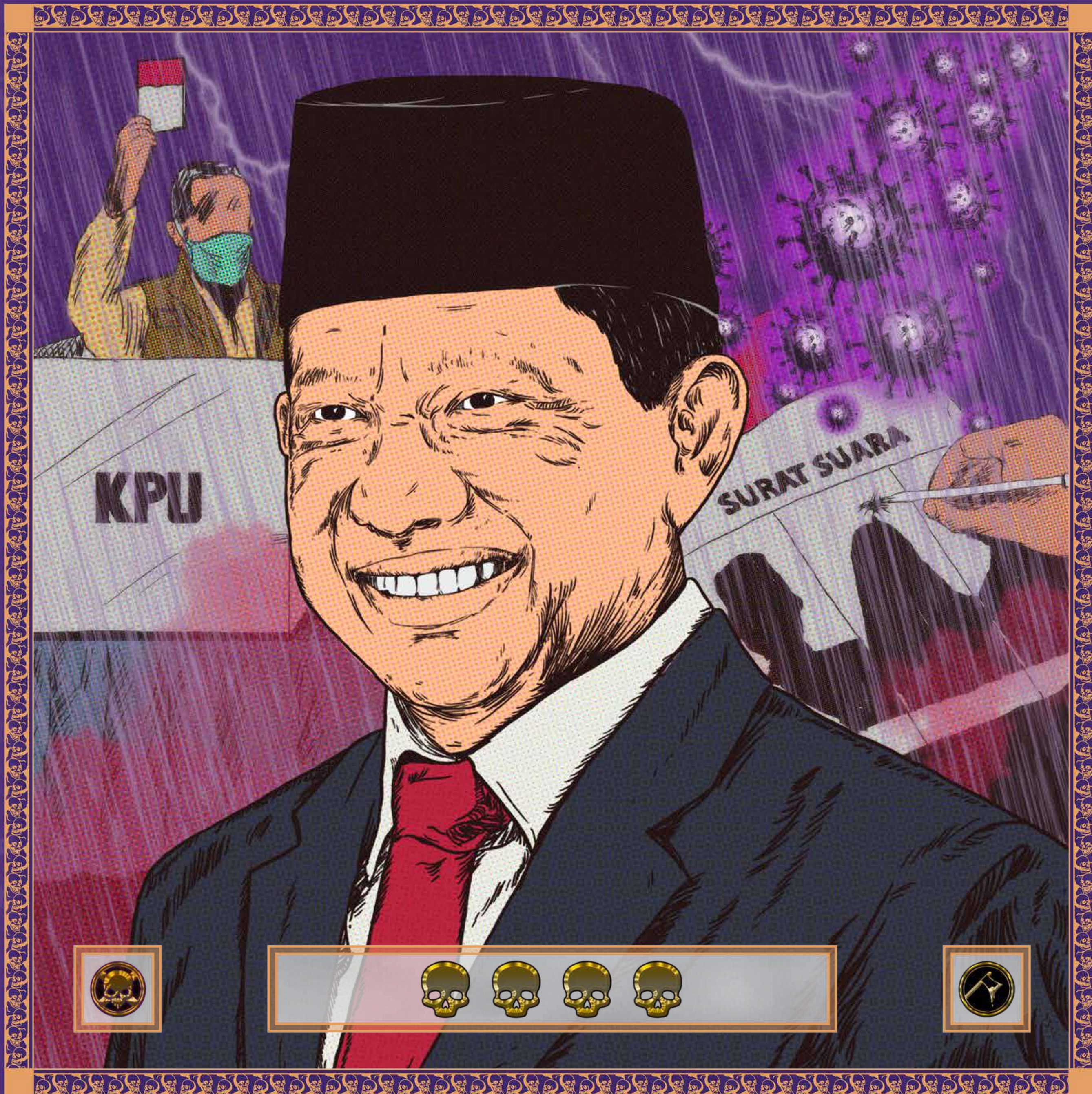
9 Desember 2020

Gibran menang Pilkada Medan.



The
UGLY





Tito adalah Menteri Dalam Negeri yang menjabat sejak 2019 di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Sebelumnya, dia adalah Kepala Kepolisian RI sejak 2016.

“Jenazah COVID-19 Dibakar Virus akan Mati”



Menteri Dalam Negeri

Tito Karnavian juga salah satu pejabat negara yang paling berwenang menentukan pelaksanaan Pilkada 2020. Ia tetap ingin Pilkada berjalan di tengah pandemi yang belum mereda. Namun di saat yang bersamaan, pihaknya menunda 3.000-an Pilkadaes dengan alasan corona. Tito bahkan pernah meminta langsung TNI dan Polri—lembaga yang pernah dirinya pimpin—untuk bantu sukseskan Pilkada di tengah pandemi.

Lembaga di bawah naungan Tito menjadi pemegang kunci pelaksanaan Pilkada karena sebagai penyedia anggaran, penjaga stabilitas politik dan keamanan, koordinasi data pemilih dengan KPU, dan penjaga netralitas ASN. Tanpa dorongan Kementerian Dalam Negeri, Pilkada 2020 tak akan dilaksanakan. Akhirnya, kasus malah melonjak, klaster dan zona merah mulai bermunculan usai Pilkada 2020.



Profil :

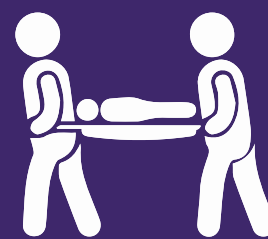
- Lahir di Palembang, 26 Oktober 1964.
- SMA Negeri 2 Palembang (1983).
- Akademi Kepolisian (1987).
- Police Studies, University of Exeter, Inggris (1993).
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1996).
- Strategic Studies, Massey University Auckland, Selandia Baru (1998).
- Sespim Polri (2000).
- Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT (2010).
- Kapolda Papua (2012).
- Doktoral Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapura (2013).
- Asrena Kapolri (2014).
- Kapolda Metro Jaya (2015).
- Kepala BNPT (2016).
- Kapolri (2016).
- Menteri Dalam Negeri (2019-sekarang).

Tarik Ulur Pilkada di Tangan Tito



21 Maret 2020

KPU tetapkan penundaan tahapan Pilkada 2020 karena COVID-19.



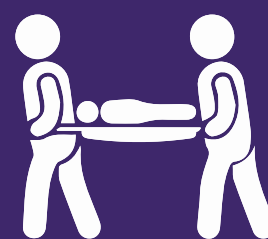
22 Maret 2020

514 orang positif COVID-19 dan 48 meninggal.



14 April 2020

Pemerintah tetapkan tanggal Pilkada jadi 9 Desember. Awalnya 23 September.



15 April 2020

5.136 orang positif COVID-19 dan 469 meninggal.



28 Mei 2020

Kementerian Dalam Negeri tak mau tunda Pilkada hingga usai COVID-19.



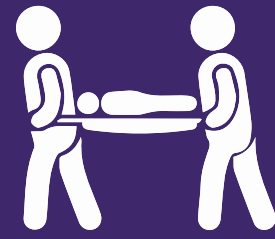
4 Juni 2020

Tito tegaskan tak akan tunda Pilkada 2020.



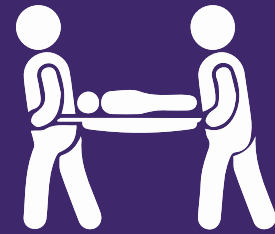
21 September 2020

Jokowi tegaskan tak akan tunda Pilkada dan tetap 9 Desember.



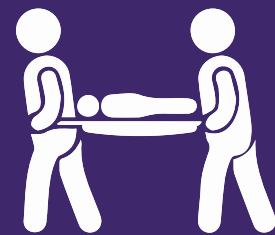
30 Mei 2020

25.773 orang positif COVID-19 dan 1.573 meninggal.



5 Juni 2020

29.521 orang positif COVID-19 dan 1.770 meninggal.



22 September 2020

252.923 orang positif COVID-19 dan 9.837 meninggal.



Efek Pilkada 2020

- Tiga komisioner KPU positif COVID-19.
- Dua Ketua KPUD meninggal karena COVID-19.
- Empat kandidat Pilkada meninggal karena COVID-19.
- 1.172 petugas KPPS yang positif COVID-19 tetap harus bekerja di hari pencoblosan.
- 485 penyelenggara Pilkada 2020 positif COVID-19.



Mahfud adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM yang menjabat sejak 2019 di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008-2013.

“Corona is Like Your Wife”



Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM

Mahfud MD adalah salah satu pejabat negara yang menganggap remeh pandemi COVID-19. Ia sempat berkelakar dengan mengibaratkan COVID-19 sama seperti seorang istri: awalnya dikira mudah mengontrolnya, namun ternyata tak bisa dan harus hidup bersama. Ucapan ini ramai dibahas oleh media internasional. Mahfud dianggap misoginis dan tidak peka terhadap posisi perempuan.

Ia juga salah satu pejabat negara yang setuju pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang belum mereda. Mahfud juga menyebut pelaksanaan Pilkada 2020 sukses dan jika ditunda akan korbankan situasi ekonomi nasional yang makin terpuruk—prioritaskan ekonomi daripada kesehatan publik.



Profil :

- Lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957.
- Madrasah Ibtidayah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura.
- SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura.
- Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura.
- Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).
- Magister Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000).
- Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (2000-2001).
- Anggota Komisi III DPR RI (2004-2008).
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013).
- Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019-2024).

Klaim Pilkada ala Mahfud



14 Desember

Mahfud klaim partisipasi Pilkada 2020 meningkat dibanding Pilkada 2015.



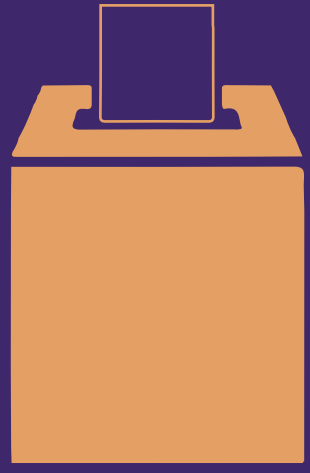
16 Desember

KPU Solo dan Medan sebut partisipasi pemilih turun dan tak sesuai target.



20 Desember

Nyatanya di beberapa daerah, angka golput lebih tinggi daripada pemenang.



Angka Golput di Wilayah Dinasti Politik :

- Depok

484.058 suara
golput
Sedangkan
pemenangnya
hanya 414.655
suara.

- Surabaya

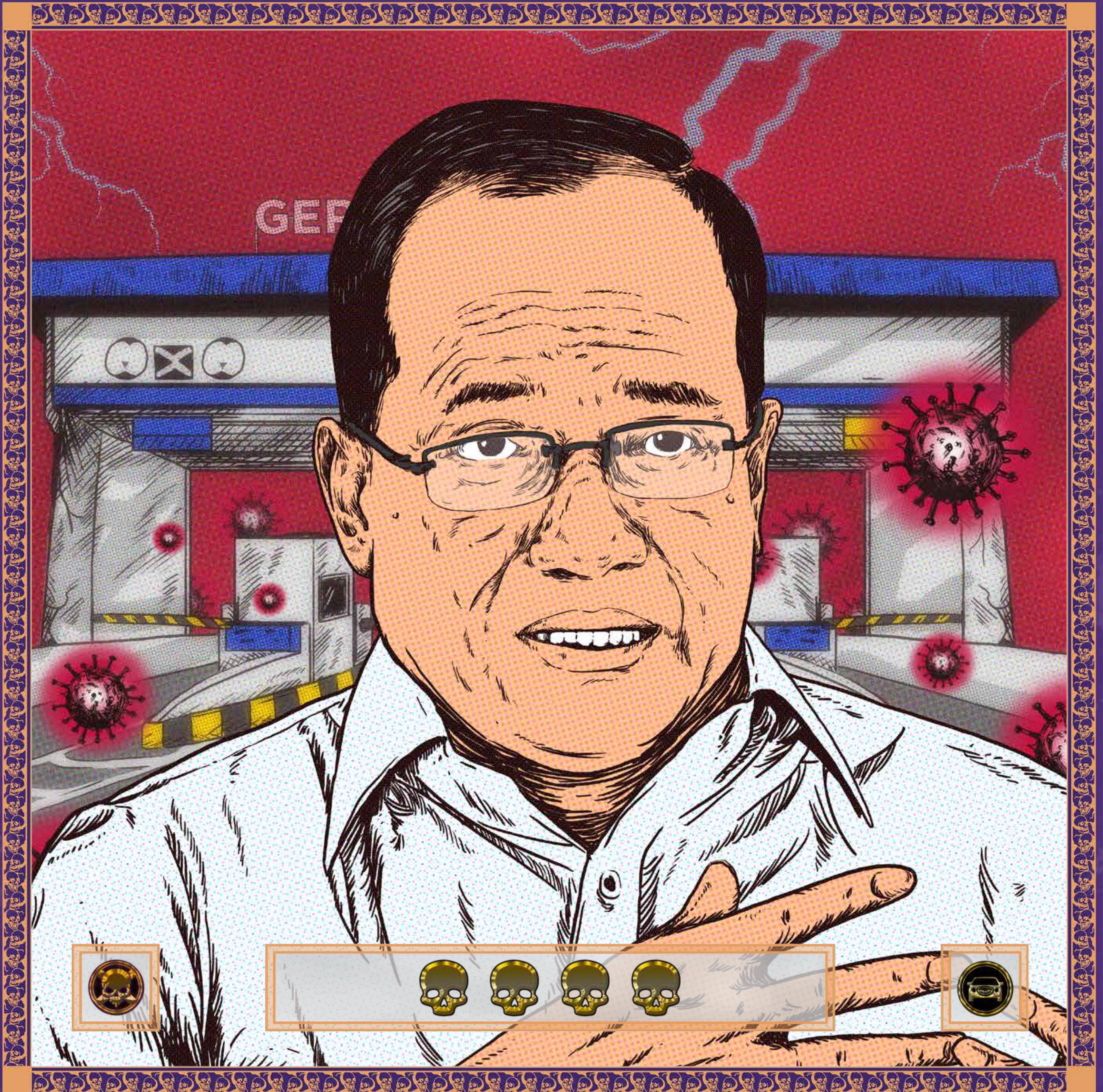
1.092.348 suara
golput
Sedangkan
pemenangnya
hanya 569.715
suara.

- Tangsel

400.311 suara
golput
Sedangkan
pemenangnya
hanya 235.656
suara.

- Medan

864.988 suara
golput
Sedangkan
pemenangnya
hanya 393.533
suara.



Budi menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 2016—dua periode kepemimpinan Jokowi. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II.

“Orang Indonesia Kebal Karena Nasi Kucing”



Menteri Perhubungan

Budi Karya adalah salah satu pejabat yang paling bertanggungjawab atas kacaunya arus lalu lintas dan mobilisasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ia kerap mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan anjuran protokol kesehatan. Akhirnya penanganan COVID-19 di Indonesia jadi semakin panjang dan makin parah. Itu terjadi karena mobilitas warga untuk keinginan mudik dan kegiatan lainnya memang tidak dibatasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan.

Ia juga merupakan salah satu pejabat negara yang pernah berstatus positif COVID-19, bahkan dua kali. Pada 14 Maret 2020, dia terjangkit corona setelah satu bulan sebelumnya pernah berkelakar bahwa COVID-19 tak bisa masuk Indonesia karena warganya kebal setelah makan nasi kucing.



Profil :

- Lahir di Palembang, 18 Desember 1956.
- SD Muhammadiyah Bukit Kecil, Sumatera Selatan.
- SMP Negeri 1 Talang Semut Lama, Sumatera Selatan.
- SMA Xaverius 1 Palembang, Sumatera Selatan (1975).
- Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (1981).
- Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol (2004-2013).
- Direktur Utama Angkasa Pura II (2015-2016).
- Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (2004-2013).
- Menteri Perhubungan (2016-sekarang).



Kebijakan Budi yang Kacau

6 Mei 2020

Budi izinkan semua transportasi operasi lagi jelang lebaran dengan alasan ekonomi. "Kami profesional medis sangat khawatir ini akan memicu penularan akan bertambah lagi," kata Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

8 Juni 2020

Budi hapus ketentuan batas 50 persen penumpang angkutan umum dan pribadi. "Keputusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19," kata anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat.

13 Januari 2021

Budi hapus ketentuan kapasitas pesawat maksimal 70 persen. "Sebab dengan menambahkan kapasitas, maka kerumunan orang di bandara semakin banyak," kata anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama.



Ida menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan sejak periode kedua Jokowi. Sebelumnya, dia adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—salah satu partai pendukung koalisi Jokowi.

“TKA Masuk untuk Transfer Ilmu”



Menteri Ketenagakerjaan

Sejak awal penanganan pandemi COVID-19, Ida mengizinkan para perusahaan untuk merumahkan para buruh. Alasannya agar menjadi solusi alternatif selain PHK. Diketahui Ida pernah berencana memboyong 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Sulawesi Utara, dengan alasan “transfer ilmu ke pekerja lokal”. Kendati akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Di tengah pandemi yang memburuk, Ida juga menjadi salah satu menteri yang paling disorot saat pembahasan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditolak ramai-ramai oleh publik.

Tak hanya itu, ia juga menetapkan upah 2021 sama dengan tahun 2020. Artinya tak ada kenaikan upah untuk pekerja. Di awal 2021, Ida memperbolehkan pengusaha di sektor industri padat karya yang terdampak corona untuk memangkas upah buruh. Padahal, kebijakan membolehkan perusahaan untuk memotong upah pekerja juga berpotensi akan mengganggu roda perekonomian karena akan melemahkan daya beli masyarakat.



Profil :

- Lahir di Mojokerto, 17 Juli 1969.
- SMP Islam Walisongo 1 Kedungmaling, Mojokerto.
- MAN Tambak Beras, Jombang.
- S1 IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Satayagama, Jakarta.
- S3 Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Anggota DPR RI (1999-2018).
- Anggota Lembaga Advokasi Perempuan PP Fatayat NU (2000-2004).
- Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (2002-2007).
- Menteri Ketenagakerjaan RI (2019-sekarang).

Manuver Ida untuk Kelas Pekerja

Harapan Kosong Kartu Pra Kerja :



Konflik kepentingan dua staf khusus Jokowi.



Anggarannya sampai Rp20 triliun.



Dimonopoli segelintir lembaga.



Pelatihannya tidak relevan.



Korban PHK butuh bantuan konkret, bukan pelatihan.



Para petinggi pelaksana Kartu Prakerja digaji hingga puluhan juta.



Banyak juga buruh korban PHK sulit akses Kartu Pra Kerja.



Borong Tenaga Kerja Asing :

- **Juni 2020**

Ida rencana membawa 500 TKA dari China dengan alasan transfer ilmu.

- **Mei 2020**

Kebijakan dibatalkan karena ditentang banyak pihak.

- **Oktober 2020**

Faisal Basri menduga pekerja China masih tetap masuk pakai visa turis.

- **November 2020**

2.174 pekerja China masuk lewat Manado.

- **Januari 2021**

153 pekerja China masuk lewat Soekarno-Hatta.

- **April 2021**

Faisal Basri sebut ada 1.460 pekerja China masuk pada Januari-Februari.



Mereka yang di-PHK

April 2020 → 150.000 orang.

Juni 2020 → 3.000.000 orang.

Agustus 2020 → 3.500.000 orang.

- **Oktober 2020**

Ida sebut pengangguran bertambah jadi 6.900.000 orang.

- **Februari 2021**

Ida klaim angka PHK masih kecil.

- **April 2021**

Ida mengaku menyesal tak ada jaminan PHK sebelah corona.



Sri Mulyani sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak periode pertama Jokowi. Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai menteri yang sama saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan menjabat di World Bank setelahnya.

“Bukan Menterinya Orang Kecil”



Menteri Keuangan

Sejak awal penanganan COVID-19, Sri Mulyani rutin memberikan keringanan kepada korporasi. Salah satunya menurunkan pajak korporasi dari 25 persen menjadi 22 persen lewat Perppu 1 tahun 2020. Dalam aturan yang sama, terdapat klausul yang menjelaskan bahwa pejabat Pemerintah tak bisa dituntut baik pidana maupun perdata jika terjadi penyimpangan. Itu artinya, Sri Mulyani dan pejabat lainnya tak bisa dihukum—ada kekebalan hukum.

Sri Mulyani juga memasukkan Klaster Perpajakan secara tiba-tiba di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Isinya banyak menebar keringanan pajak hingga berpotensi kurangi penerimaan negara. Masalah lainnya, di tengah pandemi COVID-19, anak buahnya terlibat dugaan skandal suap pemeriksaan pajak 165 perusahaan yang diusut komisi antirasuah. Nilainya mencapai Rp50 miliar.

Di sisi lain, Sri Mulyani baru membahas bantuan untuk para siswa yang kesulitan teknologi, ponsel, hingga pulsa dan kuota selama belajar daring pada Agustus 2020—setelah 6 bulan berjalan. Ia juga sempat ingin memotong insentif untuk tenaga kesehatan yang berada di garda depan penanganan pandemi COVID-19. Kendati akhirnya wacana itu batal.



Profil :

- Lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962.
- Ph.D University of Illinois, Amerika Serikat (1992).
- Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) SEA Group (2002).
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (2004-2005).
- Menteri Keuangan (2005-2009).
- Plt. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2008-2009).
- Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010-2016).
- Menteri Keuangan (2016-sekarang).



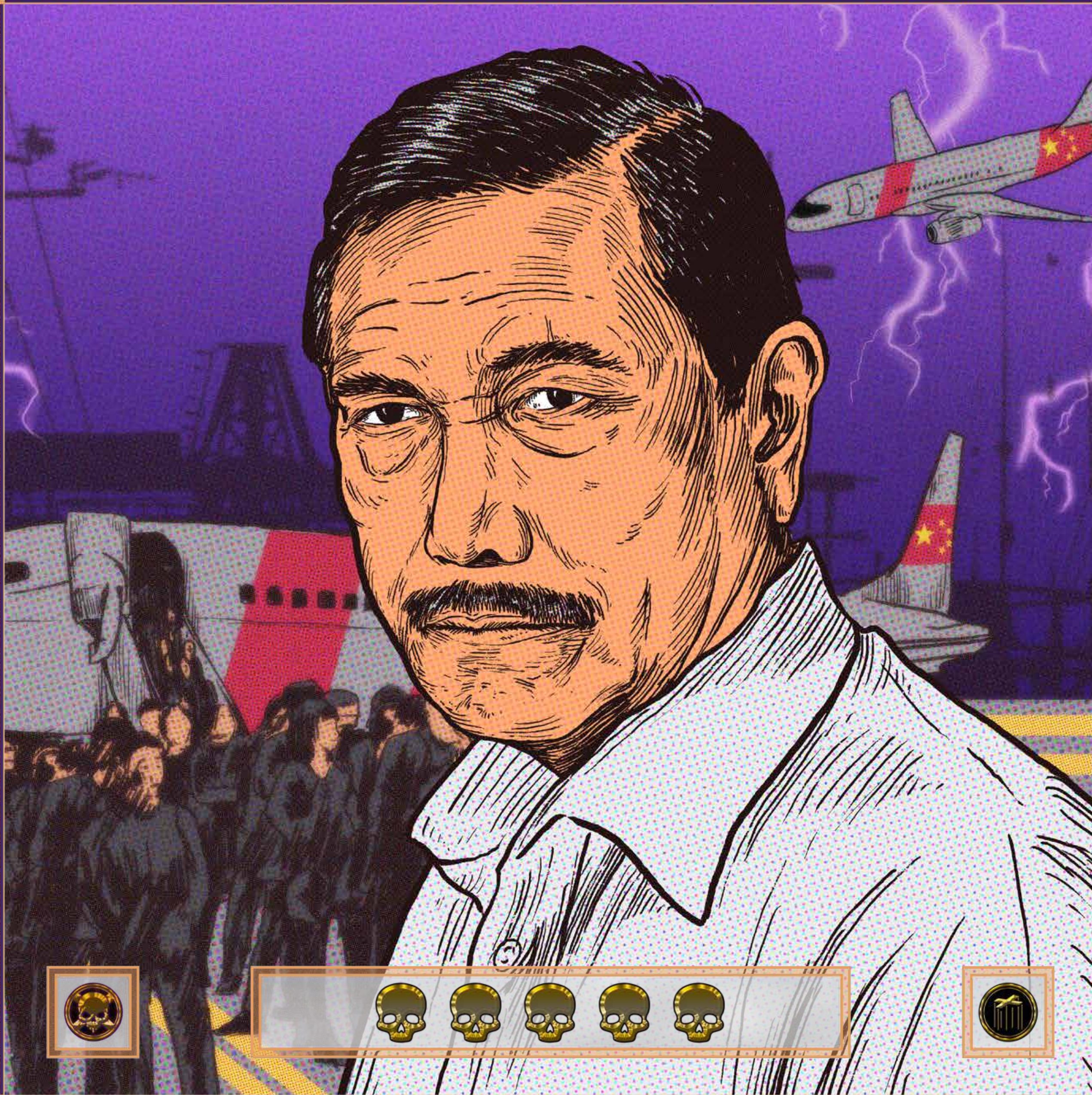
Pengusaha Lebih Utama

- **1 April 2020**
Ringankan pajak korporasi.
- **22 September 2020**
Beri diskon tagihan listrik untuk perusahaan.
- **7 Oktober 2020**
Selipkan klaster perpajakan di Omnibus Law yang ringankan pajak pengusaha.
- **1 Februari 2021**
Berencana potong insentif tenaga kesehatan.
- **4 Februari 2021**
Batalan rencana potong insentif tenaga kesehatan.



Rakyat Nomor Dua

- **11 Agustus 2020**
Sri Mulyani baru bahas bantuan untuk para siswa yang belajar daring.
- **20 Januari 2021**
Banyak warga merasa rugi karena biaya listrik membengkak.
- **4 Februari 2021**
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) protes rencana pemotongan insentif nakes.
- **18 Februari 2021**
Insentif tenaga kesehatan banyak yang belum cair. Terhambat regulasi.



Luhut merupakan salah satu orang yang paling awal mengikut Jokowi di dalam kabinet. Ia pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI (2014-2015), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015-2019), Menko Kemaritiman (2016-2019), dan yang terakhir Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

“Sayalah yang Mencetuskan Omnibus Law”



Menteri Koordinator Maritim dan Investasi

Sejak awal penanganan COVID-19, Luhut kerap buat kebijakan yang kontradiktif dengan upaya mengamankan kesehatan publik. Ia izinkan ojek online mengangkut penumpang saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim, gantikan Budi yang positif COVID-19. Keputusan itu bertentangan kebijakan PSBB yang diteken Gubernur Anies larang ojek online mengangkut penumpang. Padahal kebijakan Anies sudah sesuai dengan aturan yang diteken Menteri Kesehatan. Ia juga tidak melarang mudik pada lebaran 2020. Pertimbangannya agar ekonomi Indonesia tetap jalan.

Setelah publik dibuat geger oleh pengesahan cepat kilat Omnibus Law UU Cipta Kerja di tengah pandemi yang ditolak banyak pihak karena merugikan kaum buruh dan lingkungan alam, Luhut pun mengaku bahwa dirinyalah pencetus aturan sapu jagad itu. Luhut juga pernah mengaku bahwa ada sekitar dua juta kasus COVID-19 di Indonesia yang tidak tercatat di data nasional pada Februari 2021—bulan kesebelas penanganan pandemi. Soal sinkronisasi dan ketertutupan data memang menjadi masalah kronis sejak awal.

Karena sedari awal menganggap remeh COVID-19, memperbolehkan ojek online berpenumpang, dan tidak melarang mudik—dengan alasan ekonomi harus tetap jalan, hasilnya penanganan pandemi amburadul hingga saat ini dan korbannya banyak. Kebijakan yang dikeluarkan Luhut juga kerap membingungkan antar sesama pejabat sehingga sulit untuk menangani pandemi.



Profil :

- Lahir di Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947.
- AKABRI (1967-1970).
- National Defense University, Amerika Serikat.
- Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS).
- Duta Besar Indonesia untuk Singapura (1999-2000)
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (2000-2001)
- Kepala Staf Kepresidenan RI (2014-2015).
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015-2019).
- Menko Kemaritiman (2016-2019).
- Menko Maritim dan Investasi (2019-sekarang).

Masifnya TKA di Tengah Pandemi

Juni 2020



Menaker rencana membawa 500 TKA dari China dengan alasan transfer ilmu.

November 2020



2.174 pekerja China masuk lewat Manado.

Juli 2020



Luhut bela rencana Ida.

Januari 2021



153 pekerja China masuk lewat Soekarno-Hatta.

Mei 2020



Kebijakan dibatalkan karena ditentang banyak pihak.

April 2021



Faisal Basri sebut ada **1.460** pekerja China masuk pada Januari-Februari.

Oktober 2020



Faisal Basri menduga pekerja China masih tetap masuk pakai visa turis.



Puan adalah Ketua DPR RI sejak 2019 dan merupakan putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014-2019.

“Kami Selalu Terbuka”



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Sejak awal, DPR RI membentuk Satgas Lawan COVID-19 dan mencoba produksi ‘obat corona’ Herbavid-19 yang penuh kejanggalan. Herbavid-19 sudah didistribusikan ke para tenaga kesehatan, saat izin edar belum terbit dan tak ada keterangan tentang komposisi kandungan obatnya.

Di ranah legislasi, DPR sahkan Perppu Corona usulan Pemerintah yang memberi kekebalan hukum atau impunitas yang menghindarkan pejabat negara dari tuntutan pidana maupun perdata atas kebijakan yang mereka tetapkan. Mereka tidak bisa dipidana atau dilaporkan secara perdata. Mereka juga sahkan UU Minerba yang berpotensi menguntungkan korporasi tambang. Yang paling parah, DPR cepat kilat membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam waktu kurang dari satu tahun di tengah pandemi. Rapat kerap dilakukan tertutup, sulit diakses publik, dilakukan di hotel-hotel mewah disebut “legislasi tanpa ruang demokrasi”. Memicu demonstrasi besar di tengah pandemi karena ditolak publik. Masih terjadi revisi dan simpang siur jumlah halaman bahkan setelah disahkan.

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dianggap curi kesempatan di tengah pandemi saat publik diminta tetap di rumah menjaga protokol kesehatan. DPR RI dianggap hanya sebagai ‘tukang stempel’ Pemerintah yang ajukan ragam regulasi bermasalah dan kontroversial.



Profil :

- Lahir di Jakarta, 6 September 1973.
- Anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (2006).
- Ketua DPP PDIP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (2007- 2010).
- Ketua I Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (2009-2012).
- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (2012- 2014).
- Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga (2010-2015).
- Anggota DPR RI Komisi I (2012-2014).
- Anggota DPR RI Komisi VI (2009-2012).
- Anggota Badan Kerjasama antar Parlemen DPR RI (2009-2014).
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-2019).
- Doktor Honoris Causa (HC) Universitas Diponegoro (2020).
- Ketua DPR RI (2019-sekarang).



Cepat Kilat Sahkan Omnibus Law



20 Oktober 2019

Saat pidato pelantikan, Jokowi ingin buat Omnibus Law.



12 Februari 2020

Pemerintah serahkan draf Omnibus Law ke DPR.



25 September 2020

Pemerintah usul lagi klaster ketenagakerjaan yang sempat ditolak DPR.



26-27 September 2020

Pembahasan klaster ketenagakerjaan.



28 September 2020

Pembahasan klaster penyiaran.



29 September 2020

Pembahasan Lembaga Penjaminan Investasi (LPI).



1 Oktober 2020

Sinkronisasi RUU Cipta Kerja.



2 Oktober 2020

Sinkronisasi RUU Cipta Kerja secara tertutup.



3 Oktober 2020

Sah di tingkat satu di rapat paripurna DPR RI.



5 Oktober 2020

Sah jadi undang-undang oleh DPR dengan 905 halaman.



9 Oktober 2020

Beredar draf undang-undang dengan 1.052 halaman.



12 Oktober 2020 Pagi

Beredar draf undang-undang dengan 1.035 halaman.



12 Oktober 2020 Malam

Beredar draf undang-undang dengan 812 halaman.



14 Oktober 2020

DPR serahkan draf undang-undang ke Istana Negara.



16 Oktober 2020

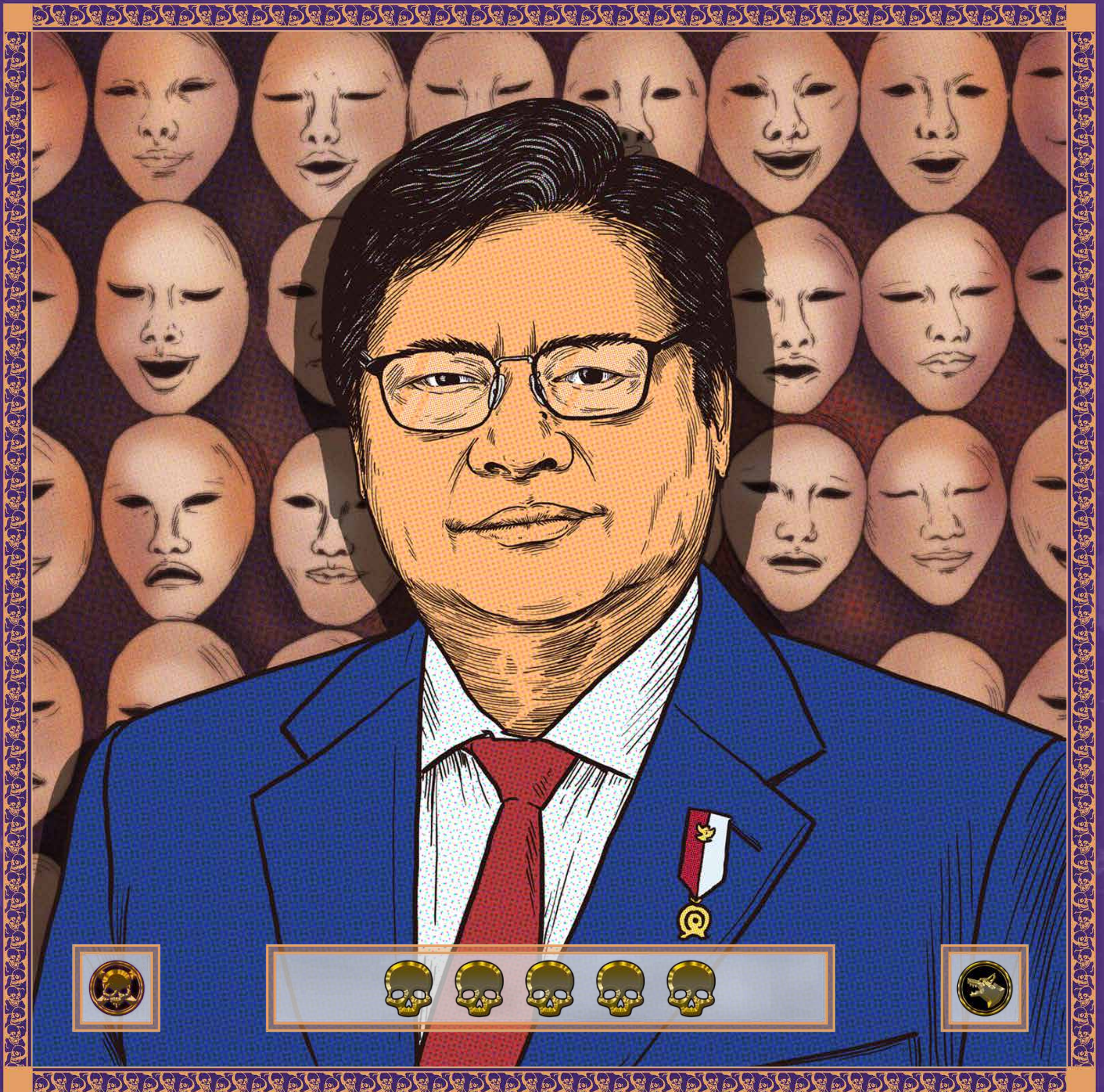
Istana Negara usulkan revisi draf sebanyak 158 item dalam 88 halaman.



2 November 2020

Sah menjadi undang-undang diteken Jokowi.





Airlangga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar—salah satu partai terbesar di Indonesia. Di periode sebelumnya, Airlangga duduk di kursi Menteri Perdagangan.

“Ada Tokoh Penggerak di Balik Demo Omnibus”



Menteri Koordinator Perekonomian

Selain mengedepankan ekonomi dan pariwisata, Airlangga menjadi salah satu menteri yang menyalahkan Gubernur Anies saat umumkan ‘rem darurat’ PSBB pada September 2020, karena berimbas pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bagi Airlangga, ekonomi lebih utama dari kesehatan. Ia juga merupakan salah satu menteri yang menutupi kasus positif COVID-19 yang menimpa dirinya. Bahkan, pihak Istana Negara sampai tak tahu ada menterinya yang kena corona. Tiba-tiba saja Airlangga menjadi pendonor plasma, yang padahal syarat utamanya pernah terinfeksi COVID-19 terlebih dahulu.

Airlangga juga merupakan salah satu pendukung pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang banyak ditolak oleh publik. Ia menuding ada dalang di balik penolakan besar-besaran aturan sapu jagad itu. Airlangga mengaku tak mau ada klaster baru dari para pendemo yang menolak Omnibus Law di berbagai daerah.



Profil :

- Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1 Oktober 1962.
- Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School University of Melbourne, Australia (1997).
- Wakil Bendahara DPP Golkar (2004-2009).
- Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama).
- Anggota Majelis Wali Amanah UGM.
- Ketua Usaha Kecil dan Menengah Koperasi DPP Partai Golkar (2011-2014).
- Ketua Umum Partai Golkar (2017).
- Menteri Perindustrian RI (2016).
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (2019-sekarang).

Kesehatan yang Tidak Penting Bagi Airlangga

● 25 Februari 2020

Airlangga siapkan dana Rp72 miliar untuk influencer untuk promosikan pariwisata.

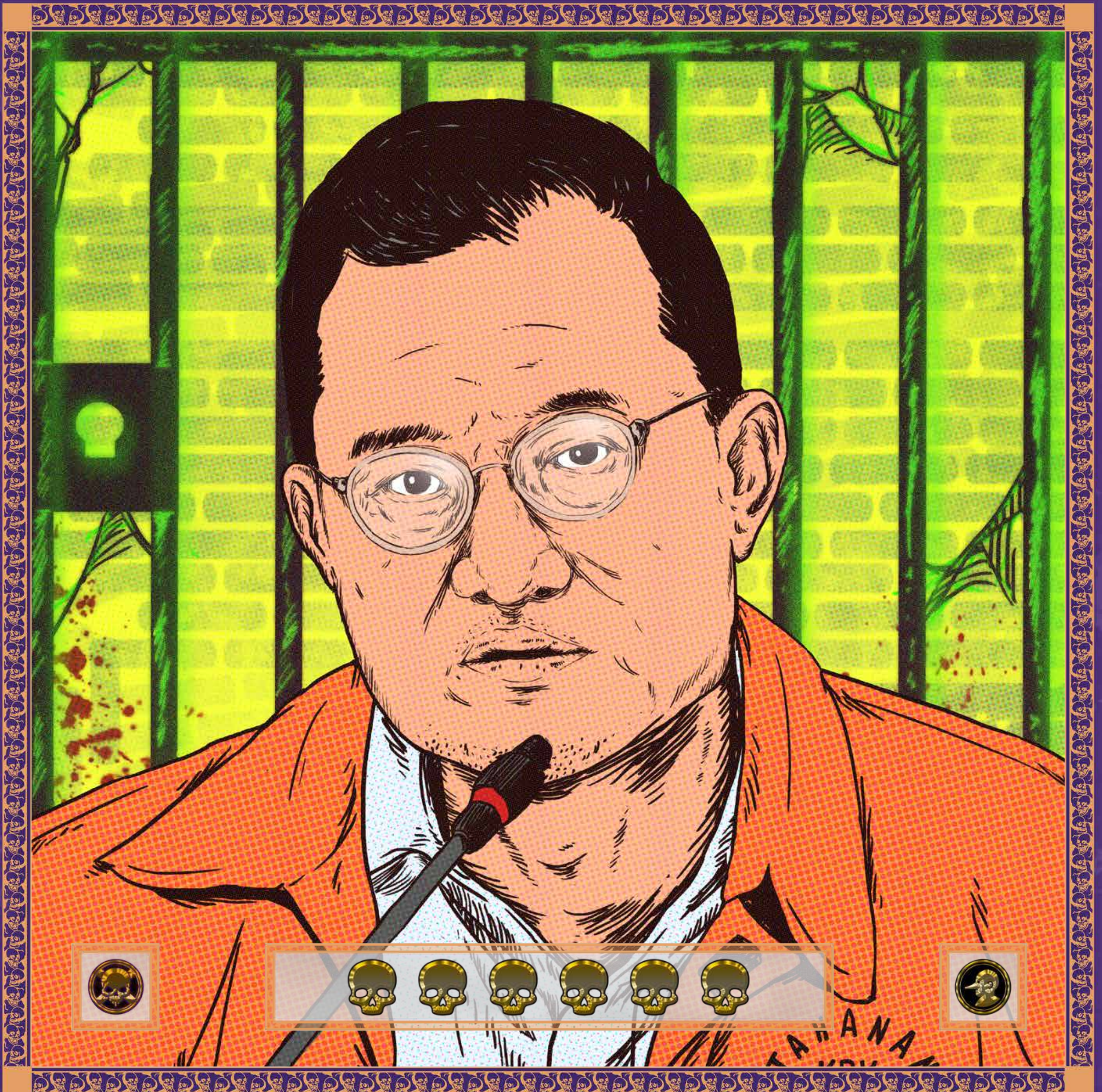
● 2 Maret 2020

Jokowi umumkan dua kasus pertama, Airlangga siapkan paket pariwisata yang aman.



Jumbonya Dana Influencer

- Airlangga siapkan dana Rp72 miliar untuk influencer.
- Jika paket bansos COVID-19 senilai Rp300 ribu per orang.
- Seharusnya bisa untuk beri paket bansos sebanyak 240.000 orang



Juliari adalah Menteri Sosial di periode kedua Jokowi, sekaligus menjabat Bendahara Umum PDIP. Sebelumnya, ia hanya anggota DPR RI biasa sejak 2014.

“Jangan Korupsi, Kasihani Anak Istimu!”



Mantan Menteri Sosial

Juliari, sebagai Menteri Sosial dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) untuk korban pandemi COVID-19. Paket bansos yang diberikan Juliari diduga digunakan untuk membantu kemenangan Pilkada 2020. Belakangan diketahui bahwa rencana korupsi bansos yang dilakukan oleh Juliari dan jajarannya di Kementerian Sosial sudah dirancang sejak sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia.

Karena masih bisa melakukan tindakan koruptif yang amat jelas di tengah penanganan wabah COVID-19, kebijakan bantuan sosial—yang merupakan hak paling mendasar warga di tengah bencana—rentan terhambat. Apalagi, sebelum kejadian korupsi terungkap, penyaluran bansos sama sekali belum beres dan banyak warga yang berhak namun belum dapat. Kejadian lancung seperti itu berpotensi membikin warga makin tidak percaya dengan penanganan negara dan partai politik. Juliari juga bisa diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di tengah bencana, kendati hukuman ini masih kontroversial.



Profil :

- Lahir di Jakarta, 22 Juli 1972.
- SD St. Franciscus ASISI (1979-1985).
- SMP St. Franciscus ASISI (1985-1988).
- SMA Negeri 8 Jakarta (1988-1991).
- S1 Riverside City College, Amerika Serikat (1991-1995).
- S2 Chapman University, Amerika Serikat (1995-1997).
- Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan (2019)
- Direktur Utama PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (2003-2012).
- Komisaris Utama PT Arlinto Perkasa Buana.
- Direktur Utama PT Bwana Energy.
- Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri.
- Anggota DPR RI Fraksi PDIP Komisi VI (2014-2019).
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2019).
- Menteri Sosial (2019-2020).



Juliari Untung

- ▶ Juliari dapat jatah Rp10 ribu per paket bantuan.
- ▶ Total ada 22,8 juta paket bansos di wilayah Jabodetabek.
- ▶ Total kutipan diperkirakan Rp228 miliar.
- ▶ Juliari tunjuk sejumlah perusahaan vendor yang belum lama berdiri.
- ▶ Ragam perusahaan itu bergerak di bidang elektronik, mobil, dan motor.



Rakyat Buntung

- ▶ Paket bansos nilainya Rp300 ribu.
- ▶ Namun isinya diduga jauh lebih murah: sekitar Rp140 sampai Rp150 ribu.
- ▶ Isinya bansos: 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, 10 bungkus mi instan, sarden, dan satu botol saus sambal atau kecap.
- ▶ Potensi kerugian bisa mencapai Rp2,73 triliun.



Kronologi Penangkapan Juliari

- ▶ 4 Desember 2020
KPK dapat informasi dugaan praktik korupsi oleh anak buah Juliari.
- ▶ 5 Desember 2020
KPK lakukan OTT ke anak buah Juliari dan pihak swasta.
- ▶ 6 Desember 2020, 01.03 WIB
Juliari berstatus tersangka dan buron.
- ▶ 6 Desember 2020, 02.50 WIB
Juliari menyerahkan diri ke KPK.
- ▶ 6 Desember 2020, 08.15 WIB
Juliari mulai diperiksa sebagai tersangka korupsi bansos COVID-19.



Idham menjabat sebagai Kapolri pada periode 2019-2021—selama penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya, dia adalah Wakil Kepala Densus 88 (2010), Kapolda Sulawesi Tengah (2014), dan Kapolda Metro Jaya (2017).

“Polisi Tak Bersama Rakyat, Ia Bersama Penguasa”



Kepala Kepolisian RI

Sejak awal penanganan pandemi COVID-19, Idham Azis teken aturan khusus yang berisikan penindakan tegas kepada masyarakat yang membuat kerumunan dan membandel saat ditertibkan. Ia juga bikin aturan bagi seluruh jajaran kepolisian menindak tegas penghina penguasa, Presiden, hingga pejabat pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dinilai kontraproduktif dan tidak memberi rasa aman ke warga.

Oktober 2020, sebelum aksi besar-besaran tolak Omnibus Law di beberapa daerah, Idham meneken aturan untuk jajarannya mengintai, melarang, dan melawan narasi penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Polri diduga melakukan pembungkaman dan melanggar HAM kepada para penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja selama Oktober 2020. Amnesty Internasional menyebut ada 43 kekerasan polisi kepada para pendemo.

Namun, Idham dan jajaran kepolisian lainnya justru tak berkutik saat pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tiba di Jakarta. Kerumunan massa di Cengkareng, Petamburan, dan Bogor menyambut kedatangan Rizieq berjalan lama tanpa ada pembubaran paksa—seperti yang diancam di awal oleh Idham.



Profil :

- Lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Januari 1963.
- Wakasatreserse Polda Metro Jaya (2001).
- Wakapolres Metro Jakarta Barat (2004).
- Kapolres Metro Jakarta Barat (2008).
- Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009).
- Wakil Kepala Densus 88 (2010).
- Dirlitpidkor Bareskrim Polri (2013).
- Kapolda Sulawesi Tengah (2014).
- Irwil II Itwatsum Polri (2016).
- Kapolda Metro Jaya (2017).
- Kapolri (2019-2021).



Alat Represi Negara

- ▶ **157**
orang korban UU ITE sepanjang 2020.
- ▶ **1.500**
aduan kekerasan aparat dalam kasus penolakan Omnibus Law.
- ▶ **402**
orang jadi korban kekerasan polisi dalam kasus penolakan Omnibus Law.
- ▶ **43**
video kekerasan aparat dalam kasus penolakan Omnibus Law.
- ▶ **5.918**
orang yang ditangkap dalam kasus penolakan Omnibus Law.
- ▶ **1.900**
dokumentasi kekerasan polisi dalam kasus penolakan Omnibus Law.
- ▶ **76**
kasus kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh polisi sepanjang 2020.



Terawan menjabat sebagai Menteri Kesehatan sepanjang 2019-2020—selama penanganan COVID-19. Sebelumnya, ia kenal sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, dia menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto sejak 2015.

“Enjoy Aja”



Mantan Kementerian Kesehatan

Tiga bulan pertama sebelum dan awal penanganan COVID-19 di Indonesia, Terawan sebagai salah satu pejabat yang paling bertanggung jawab di bidang kesehatan justru kerap mengeluarkan ucapan yang antisains, meremehkan wabah, hingga tak serius melakukan mitigasi. Mulai dari meminta warga jangan panik, “enjoy aja”, meremehkan penelitian dari Harvard University, menyalahkan warga yang beli masker sehingga terjadi kelangkaan, dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena COVID-19 tak masuk Indonesia. 2 Maret 2020 dua pasien perdana diumumkan Presiden Joko Widodo. Di hari yang sama, Terawan sempat mengomel wartawan karena menggunakan masker. Kata dia, wartawan terlalu heboh dan yang pakai masker hanya orang sakit saja satu bulan setelahnya Pemerintah mewajibkan warga menggunakan masker.

Di tengah pandemi, Terawan disebut tidak mengubah manajemen kerjanya. Ia dianggap memimpin sebuah lembaga yang bekerja di bidang kesehatan sebagaimana situasi normal, bukan saat sedang wabah. Terawan gagap, kurang tanggap, dan tak memiliki rencana besar penanganan pandemi. Terawan dianggap salah satu tokoh yang paling bertanggungjawab atas amburadul dan gagalnya penanganan COVID-19 di Indonesia yang sudah memakan banyak korban warga sipil dan tenaga kesehatan.

Tepat empat hari sebelum Jokowi mengumumkan pemecatan, Terawan sebagai Menteri Kesehatan rupanya menandatangani surat Keputusan Menkes nomor HK.01.07/MENKES/11176/2020 tentang Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2 pada 18 Desember 2020 dasar legitimasi perencanaan Vaksin Nusantara yang ditentang banyak pihak.



Profil :

- Lahir di Yogyakarta, 5 Agustus 1964.
- SMA Bopkri 1 Yogyakarta (1983).
- S-1 Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (1990).
- S-2 Spesialisasi Radiologi, FK Universitas Airlangga, Surabaya (2004).
- S-3 Doktor, FK Universitas Hasanuddin Makassar (2013). Ketua
- Umum Organisasi International Committee on Military Medicine (ICMM).
- Ketua ASEAN Association of Radiology (2014).
- Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia.
- Dokter Militer, TNI Angkatan Darat (1990).
- Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat di Mataram (1990-1998).
- Anggota Tim Dokter Kepresidenan (2009).
- Dosen Luar Biasa Radiologi Universitas Pelita Harapan.
- Kepala RSPAD Gatot Soebroto (2015).
- Menteri Kesehatan (2019-2020).

Terawan di Tengah Pandemi

Omeli wartawan yang gunakan masker saat liputan

2 Maret 2020

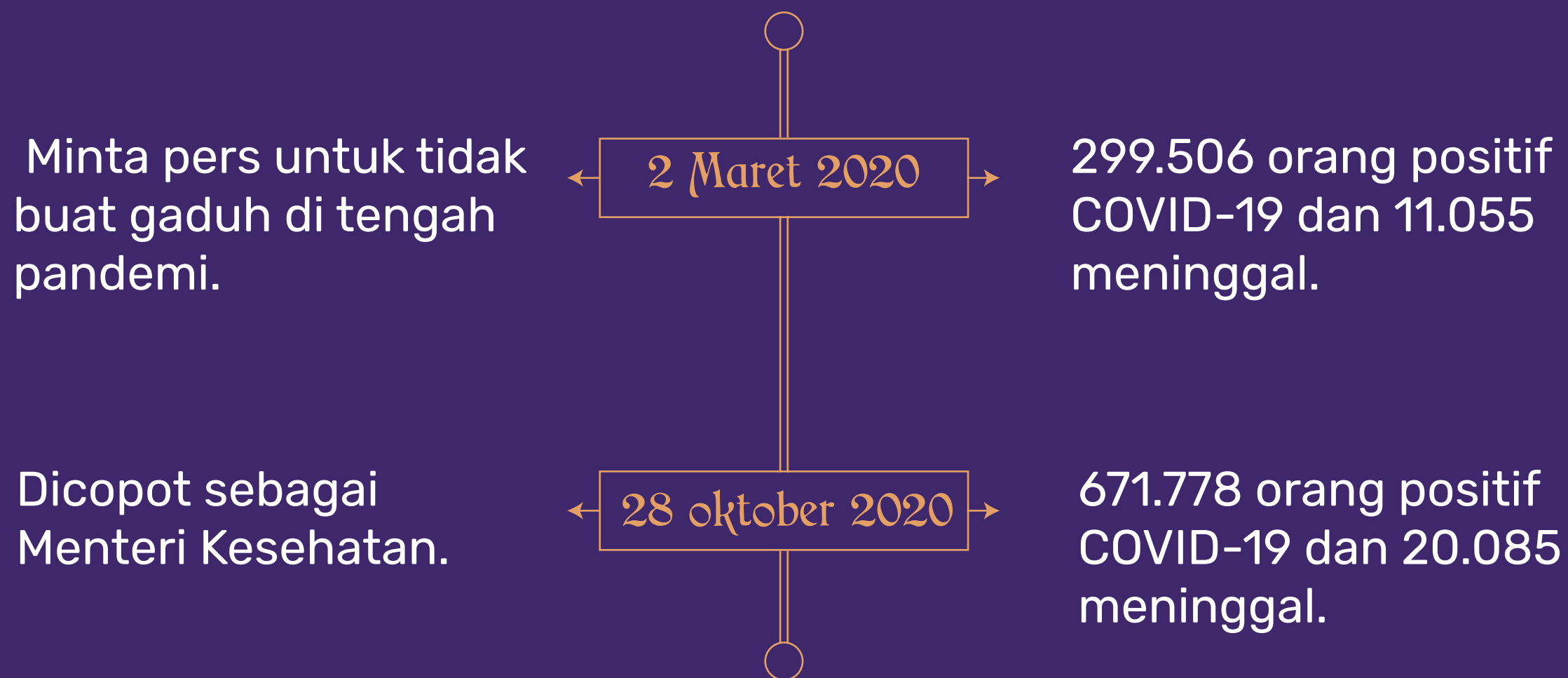
Dua orang pertama positif COVID-19.

Tak hadir saat diundang di acara Mata Najwa.

28 oktober 2020

278.722 orang positif COVID-19 dan 10.473 meninggal.

Terawan di Tengah Pandemi



Rendahnya Serapan Anggaran Pandemi (Juni 2020)

Kementrian Sosial

0,89%

Kementrian Kesehatan

2,17%

Kementrian Agama

2,19%

Kementrian Keuangan

3,43%

Kementrian Pertanian

9,32%

Padahal, seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi salah satu lembaga paling produktif di tengah wabah.



Nama Denny tenar sebagai salah satu influencer di media sosial sejak beberapa tahun silam karena rutin membela kebijakan Pemerintah. Sedangkan Fadjoel adalah juru bicara Presiden sejak 2019. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu aktivis politik dan setelah menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

“Orang Sibuk Sebarkan Isu Corona itu Jelas Binatang”



Buzzer Politik

Mereka adalah para pendengung yang kerap membela sampai mati kepentingan negara, seberapa pun buruk kebijakan itu untuk masyarakat. Posisinya cenderung mengancam demokrasi karena kerap memanipulasi suara publik yang sah dan alami. Mereka juga kerap memainkan sentimen gender, ras, hingga agama ke ruang media sosial, tak peduli dampak terburuknya ke masyarakat.

Negara gelontorkan uang puluhan miliar rupiah untuk influencer, namun minim dana untuk riset COVID-19. Pemerintah gunakan influencer (dan buzzer) untuk melawan kritik dan mengkampanyekan programnya.

Karena kerap mengeluarkan pernyataan yang didukung oleh para buzzer dan influencer, akhirnya sejumlah pengamat menilai proses demokrasi berjalan semu. Pemerintah seperti membiarkan disinformasi yang kerap dikeluarkan para influencer dan buzzer, serta membuat Indonesia semakin sulit menangani COVID-19. Para influencer dan buzzer dipersalahkan karena bentuk propaganda digital yang dilancarkan merusak etika publik dengan kedok kebebasan berekspresi. Karena kehilangan legitimasi dari publik—warga yang sesungguhnya, Pemerintah malah menggunakan influencer dan buzzer untuk mendukung kebijakan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai menyebut dosa penggunaan buzzer karena rentan menyebar kabar bohong.



Profil :

Denny Siregar :

- Lahir di Medan, 3 Oktober 1973.
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Radio Suara Surabaya.
- Radio Pendidikan di Dinas Pendidikan Jawa Timur.
- Pendiri Baboo.
- Aktif menulis di Facebook (sejak 2010).
- Terbitkan buku "Tuhan dalam Secangkir Kopi" (2016).



Denny Sang Pendengung

● 2 Maret 2020

"Banyak daerah wisata di Indo, sepi turis kena dampak Corona. Ekonomi anjlok, ribuan orang hilang pendapatan. @jokowi kucurkan ratusan M rupiah utk diskon tiket & byr influencer luar spy terus promo wisata. Eh, ada org dgn teganya sibuk sebarkan isu Corona. Itu jelas2 binatang."

● 21 Maret 2020

"China juga yang bantu kita dengan kirimkan obat2an dan alat kesehatan. Iya, China. Bukan. Bukan Saudi. China..."

● 11 April 2020

"Meskipun banyak orang yang teriak "lockdown" tanpa mengerti artinya, saya tetap bersikeras bahwa menutup diri itu membahayakan situasi, terutama di negara ini."

● 27 September 2020

“Demi ekonomi, pilkada harus dilangsungkan. Karena ada 270 daerah yang memilih dan disana ada ekonomi berputar di daerah senilai 10 triliun rupiah.”

● 25 Februari 2021

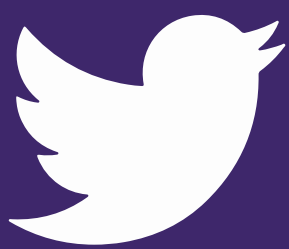
“Rizieq itu dipenjara karena mengundang kerumunan waktu nikah anaknya dan bohong dia ga kena covid.. Bukan karena penjemputan di bandara yang mereka bilang aksi spontan. Lu mau samakan penyambutan @jokowi di NTT sama dengan Rizieq ?? Samanya dari mana ?? Hhh.. Kutang bekas.”



Profil :

Fadjroel Rachman :

- Lahir di Banjarmasin, 17 Januari 1964.
- Forum Demokrasi (Fordem)
- Ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (1994)
- Komisaris Utama Adhi Karya (2015-2020)
- Komisaris Waskita Karya (2020)
- Juru Bicara Presiden (2019-sekarang)



Kicauan dari Istana Negara

● 2 April 2020

“Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan.”

● 8 Juni 2020

“Ini menunjukkan sistem responsif pandemi yang dibangun Presiden Joko Widodo benar-benar bekerja dalam menciptakan keamanan dalam dimensi kesehatan, sosial dan ekonomi.”

● **23 Juli 2020**

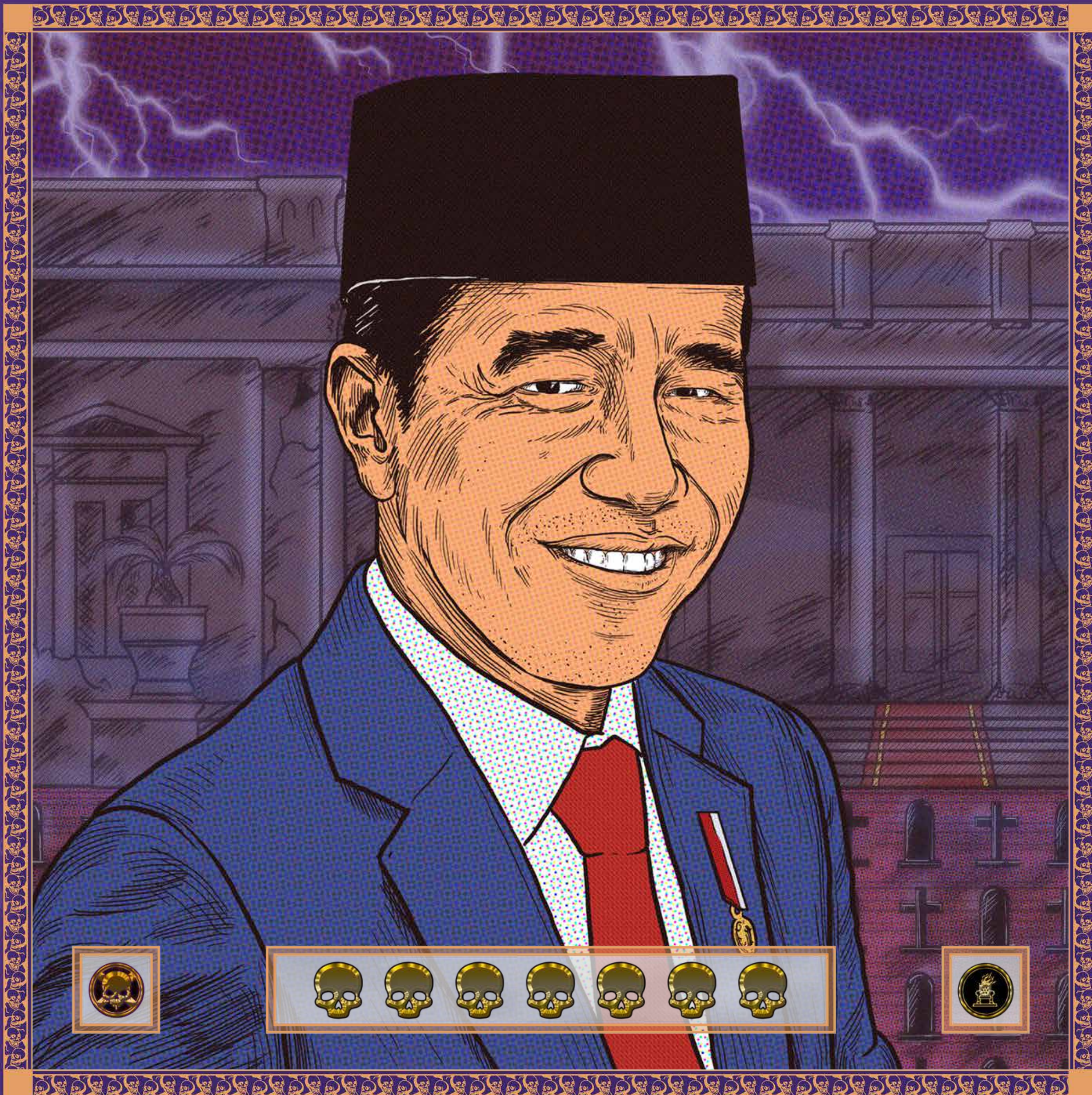
“Pilkada diikuti 106 juta pemilih, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan melibatkan 3,5 juta orang untuk enam bulan.”

● **31 Agustus 2020**

“Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital (salah satunya influencer) umumnya adalah kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital.”

● **12 Februari 2021**

“Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres. Influencer atau KOL (key opinion leaders) terkait COVID-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi COVID-19.”



Jokowi berkuasa sebagai Presiden sejak 2014—selama dua periode. Dia adalah kader partai banteng. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2005 dan berhenti di 2012 karena maju ke Pilgub DKI Jakarta. Jokowi berhasil duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, namun tak sampai tuntas karena maju di Pilpres 2014.

“Itu Bukan Mudik tapi Pulang Kampung”



Presiden RI

Sedari awal, Jokowi tak tegas buat aturan untuk batasi masyarakat dan lebih mementingkan perputaran ekonomi. Akhirnya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia berantakan, amburadul, dan kerap tidak tepat. Belum lagi Jokowi tak bisa disiplinkan para anak buahnya yang berulah: Menteri Airlangga tak jujur kalau positif, dua menteri terjerat korupsi benur dan bansos, hingga Kepala Kantor Staf Presiden yang cawe-cawe politik.

Ragam kebijakan memang sudah dikeluarkan dalam menangani wabah dan meringankan warga yang terdampak. Namun, di banyak kasus, tak sedikit kebijakan muncul telat dan kerap kontradiktif dengan sikap Pemerintah.

Setidaknya, sudah 37.266 nyawa melayang selama satu tahun penanganan wabah oleh rezim yang sejak awal sangat terlihat tak sigap, bahkan cenderung meremehkan. Maka tak heran jika selama satu tahun terakhir banyak warga yang abai dengan corona hingga muncul jejaringan solidaritas antara sesama warga, karena memang sedari awal Pemerintah tak serius tangani wabah.

Dengan banyaknya masalah dan minimnya upaya yang dilakukan Pemerintah, Indonesia bertengger di posisi 18 dengan kasus positif terbanyak di dunia. Posisi kita jauh di atas berbagai negara Asia Tenggara lainnya: Malaysia di posisi 45, Myanmar di posisi 75, hingga Singapura yang berada di posisi 99.



Profil :

- Lahir di Surakarta, 1 Juni 1961.
- Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) (1980-1985).
- Mendirikan CV. Rakabu (1988).
- Wali Kota Surakarta (2005-2012).
- Gubernur DKI Jakarta (2012-2014).
- Presiden RI (2014-2019).
- Presiden RI (2019-sekarang).

Remehkan Corona

→ **24 Februari 2020**

Sebut tak ada warga yang kena corona.

→ **24 April 2020**

Sebut cuaca panas bikin corona cepat mati.

→ **11 Februari 2020**

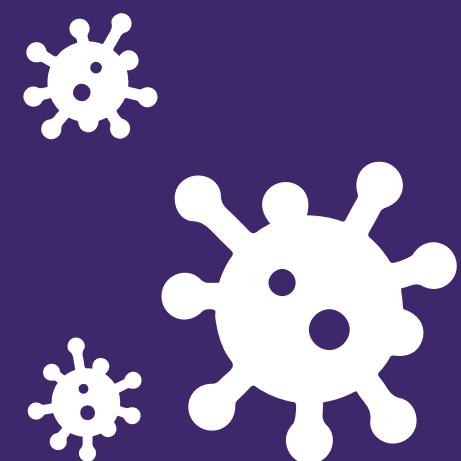
Tawarkan bantuan ke China untuk tangani wabah.

→ **27 April 2020**

Sebut corona akan selesai Juni dan Juli akan hidup normal.

→ **16 April 2020**

Sebut corona akan selesai di akhir tahun.



Sembunyikan

Data



- **13 Maret 2020**

Sebut tak semua data disampaikan ke publik, agar tidak gaduh.

- **18 April 2020**

Data COVID-19 antara daerah dan pusat simpang-siur.

- **4 Juli 2020**

Angka kematian jauh lebih tinggi dari yang diumumkan.

Prioritaskan Ekonomi



- **31 Maret 2020**

Terbitkan Perppu No. 1 tahun 2020 yang ringankan pajak pengusaha.

- **1 April 2020**

Menolak lockdown karena ekonomi bisa berhenti.

- **15 Mei 2020**

Kampanye new normal. Diduga pesanan pengusaha.

- **9 Oktober 2020**

Tak mau batalkan Omnibus Law. Minta penolak gugat ke MK.

- **15 Februari 2020**

Jokowi buka opsi vaksinasi mandiri untuk pengusaha.

Pakai Pendekatan Keamanan



- **30 Maret 2020**
Keluarkan opsi darurat sipil untuk tangani corona.
- **4 April 2020**
Membiarkan polisi tangkap penghina pejabat di tengah corona.
- **13 Agustus 2020**
Libatkan TNI untuk urusi COVID-19
- **2 Oktober 2020**
Membiarkan polisi intai dan larang penolak Omnibus Law.
- **15 Maret 2020**
Tangkap buruh pendemo dengan UU Kekejarantinaan Kesehatan.



Jaga Stabilitas Politik

20 April 2020

Tetap lanjutkan proyek ibu kota baru di tengah pandemi.



21 September 2020

Jokowi tegaskan tak akan tunda Pilkada saat pandemi.



9 Desember 2020

Memastikan putra dan menantunya menjadi kepala daerah.



15 Februari 2021

Buka peluang revisi UU ITE, tapi tak ajukan ke DPR.

Forgive your enemies, but never forget their names.

PANDEMIC VERSARY

The GOOD The BAD And The UGLY



Alamat Redaksi :
WeWork #108 - Gama Tower
Jalan HR. Rasuna Said C-22, Karet, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

